LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKJiP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JALAN ADE IRMA SURYANI NASUTION NO.1254 PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, 30121
☎ 0711 - 314004 http://dpppa.sumselprov.go.id/ @dpppasumsel

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan Laporan tahunan sebagai merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 .

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Periode RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, merupakan periode transisi sebelum Pilkada 2024.

Realisasi dari kesembilan Indikator Kinerja utama (IKU) Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2024 jika dirata-ratakan persentase capaiannya mencapai 115,76 %.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dijabarkan dalam Belanja Langsung melalui 7 Program, 20 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis dengan Anggaran sebesar Rp. **11.569.576.000,-**, realisasi sebesar Rp. **11.038.708.314,-** atau 95,41 % dan realisasi fisik 100 %.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya dan ada 9 Kab/Kota memperoleh penghargaan APE Tingkat Pratama, dan selanjutnya akan ada pada tahun 2025.

Sedang terkait Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Selatan berusaha menjadi Provinsi Layak anak dengan mendorong pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan KLA di Tahun 2022 meningkat menjadi 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA di Tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber berdaya serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam menangani pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur. Kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sadari mungkin belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, kami

berusaha agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024.

Dalam melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selayan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak akan dapat mengatasi atau mengurangi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak tanpa danya dukungan dan support dari berbagai pihak.

Akhirnya harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sehingga dapat menjadi dorongan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

“ PEREMPUAN BERDAYA, ANAK TERLINDUNGI,
INDONESIA MAJU”

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan AnakProvinsi
Sumatera Selatan,

FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Nip. 196903282089082002
Pembina Utama Muda /IV.c

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	7
C. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	15
D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS	20
B. RENCANA KINERJA	32
C. RENCANA ANGGARAN	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. CAPAIAN KINERJA	41
B. REALISASI ANGGARAN	90
C. CAPAIAN KEBERHASILAN	97
BAB IV PENUTUP	99
LAMPIRAN	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
Lampiran 2 : Pohon Kinerja dan Cascading
Lampiran 3 : RKT
Lampiran 4 : Tabel Pengukuran Kinerja
Lampiran 5 : Realisasi Anggaran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dengan **6 (enam) sub urusan**, yaitu :

a. Kualitas Hidup Perempuan

Dengan kewenangan :

- **Pelembagaan** Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
- **Pemberdayaan perempuan** bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

b. Perlindungan Perempuan

Dengan kewenangan :

- **Pencegahan kekerasan** terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penyediaan layanan** rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinnasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

c. Kualitas Keluarga

Dengan kewenangan :

- **Peningkatan** kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota.
- **Penguatan dan pengembangan** LPLPKK (Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga) dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota.
- **Penyediaan layanan** bagi keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota.

d. Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kewenangan :

- **Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian** data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

e. Pemenuhan Hak Anak

Dengan kewenangan :

- **Pelembagaan** PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan Pengembangan** lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

f. Perlindungan Khusus Anak

Denggan kewenangan :

- **Pencegahan** kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Visi dan Misi

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan berakhir di tahun 2023 dan selanjutnya diisi oleh Penjabat Gubernur, hal ini diitindaklankuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 periode keempat (tahap ke IV) yang merupakan

perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka panjang dapat terlaksana dengan maksimal. Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan periode terakhir dimana untuk mencapai target RPJPD diakhir periode.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, ”**Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu,

1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional,
2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan,
3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan
4) meningkatkan kapasitas manajeman kepemerintahan.

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi, arahan, serta agenda pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan visi, misi

RPJMN, serta agenda pembangunan, visi RPJMN yang tertuang yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun (2024-2026). Implementasi dari RPD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan

1. **Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,** dengan indikator:
   - Laju Pertumbuhan Ekonomi
   - Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB (Juta Rp)
   - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
   - Indeks Entropi Theil

2. **Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan**
   - Tingkat Kemiskinan
   - Gini Ratio

3. **Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan**
   - Indeks Pembangunan Manusia
   - Indeks Pembangunan Gender
   - Indeks Pembangunan Pemuda
   - Prevalensi Stunting

4. **Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana**

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase Penurunan Emisi GRK
- Indeks Risiko Bencana Sumsel

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

- Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menunjang pencapaian :

Tujuan Kedua : Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta

Tujuan Kelima : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut;

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :

B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, membawahi :
   a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi :
   a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
   b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
   c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
   a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
   b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
   c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi :
   a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
   b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Pertisipasi
   c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi :
   a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
   b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
   c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan:

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

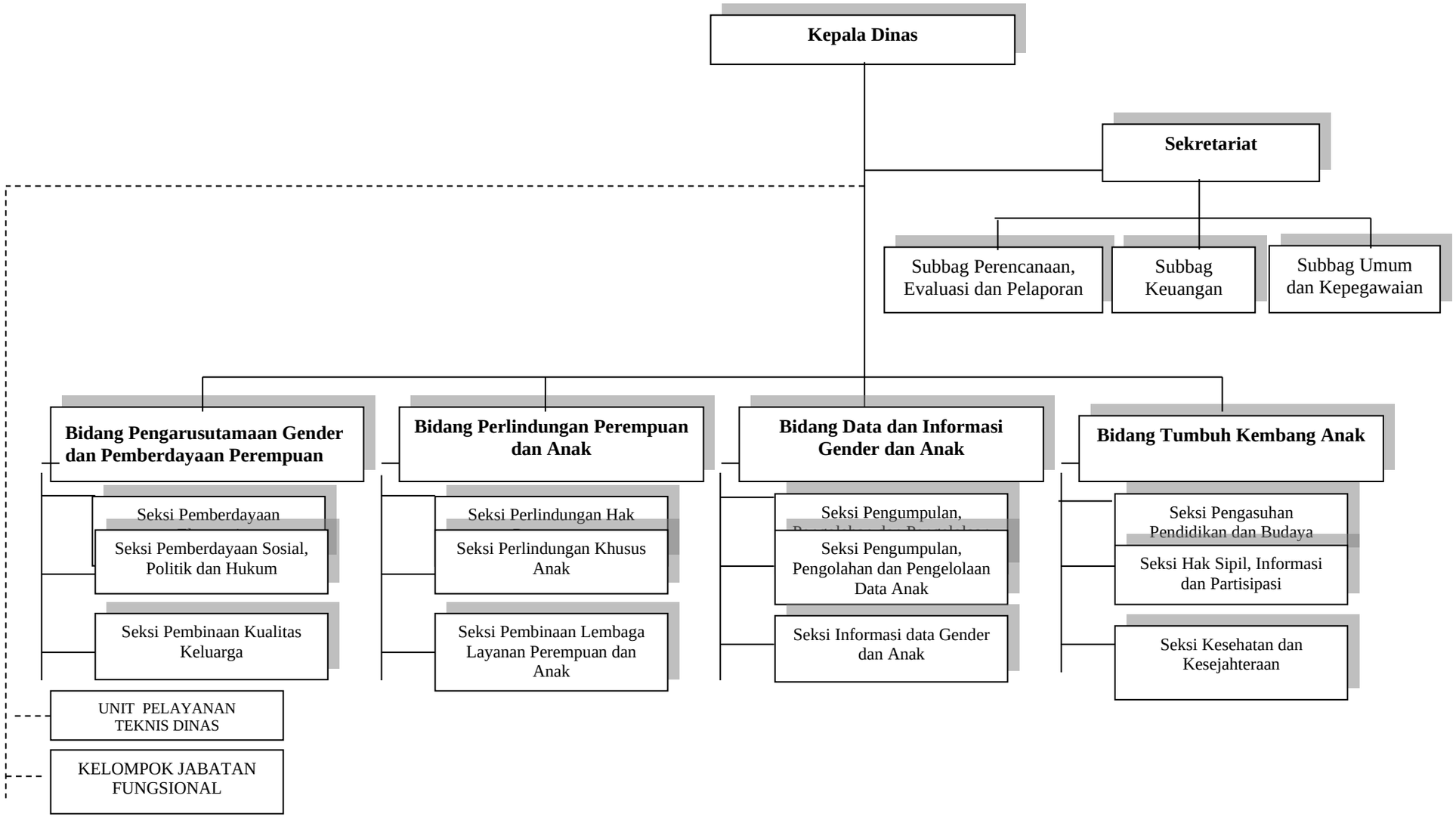

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Penerima Pengaduan;
d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

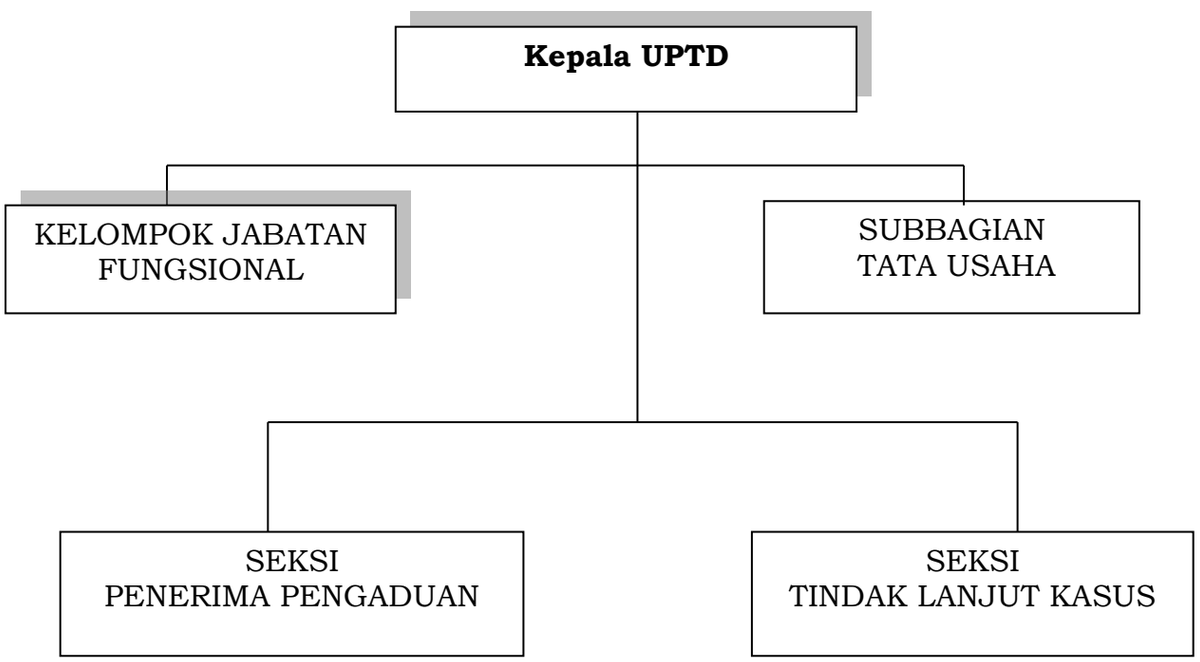

Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 36 orang ASN dan 29 orang tenaga honorer (per 31 Desember 2024), terdiri dari 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.

Sedangkan Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir Tahun 2024 berjumlah 36 orang terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris merangkap Kepala UPTD, 4 orang Kepala Bidang, 15 orang Kepala Sub Bagian/Seksi, Staff ASN sebanyak 15 orang. Staf Honorer sebanyak 26 orang.

Latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki cukup beragam, untuk ASN terdiri dari Tingkat Pendidikan SMP Sederajat sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, SMA sederajat sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, S.1 sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan, S.2 sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan. Sedangkan untuk Tenaga Honorer berjumlah 26 (dua puluh tujuh) orang, dengan latar belakang SMA Sederajat sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, D3 sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan, S2 sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	8	10	18
S 1	6	9	15
D 3	0	0	0
SMA	2	0	2
SMP	1	0	1
JUMLAH	**17**	**19**	**36**

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	1	1	2
S 1	5	8	13
D 3	1	2	3
SMA	4	4	8
SMP	0	0	0
JUMLAH	**11**	**15**	**26**

Sedangkan Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah, golongan I berjumlah 1 (satu) orang laki-laki, Golongan II berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, Golongan III berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri 8 (delapan) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan, Golongan IV berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri 6 (enam) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan.

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	6	7	13
III	8	12	20
II	2	0	2
I	1	0	1
JUMLAH	**17**	**19**	**36**

Ketersediaan Jumlah dan Kualifikasi Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang mengingat tugas dan fungsi yang diemban. Untuk menambah jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Gedung Kantor (eks kantor BPKAD Provinsi) efektif pemakaian bulan Maret 2014. Secara umum gedung kantor sudah memadai, terletak di komplek perkantoran provinsi

dan mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun masih dibutuhkan renovasi gedung agar ruangan yang ada dapat maksimal dipakai sesuai kebutuhan dan perbaikan bagian yang rusak.

Selain gedung kantor, sejak April Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengelola Rumah Aman (*safe house*), yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Mobil	8 unit	√	-	5 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ±10 tahun)
2	Motor	7 unit	√	-	3 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ≥10 tahun)
3	AC	65 unit	√	√	10 unit rusak, 40 rusak berat (termakan usia dari tahun 2012)
4	Lemari Penyimpanan	2 unit	√	-	
5	Lemari Besi	12 unit	√	-	
6	Filling Cabinet Besi	35 Unit	√	-	
7	Notebook	8 unit	√	√	4 unit rusak berat (tidak bisa dipakai lagi)
8	Rak Besi	3 unit	√	-	
9	Meja rapat	4 unit	√	-	
10	Kursi rapat	90 unit	√	√	40 unit rusak berat
11	Kursi tamu	6 set	√	-	
12	Kursi putar	12 unit	√	-	
13	Meja ½ Biro	17 unit	√	-	
14	Sofa	5 unit	√	-	
15	Komputer/PC Unit	19 unit	√	√	9 unit rusak berat
16	Laptop	14 unit	√	√	5 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak berat
17	Printer	49 unit	√	√	29 unit rusak berat
18	Kursi Kerja	101 unit	√	√	26 unit tidak layak pakai
19	Meja Kerja Pegawai	49 unit	√	√	25 unit kondisi tidak layak pakai
20	Meja maket	2 unit	√	-	
21	Faksimile	2 unit	√	-	
22	Telephone	1 unit	√	-	

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
23	Kamera	3 unit	√	-	
24	Lemari/mebeleur lain	6 unit	√	-	
25	Lemari Es	2 unit	√	-	
26	Tablet PC	1 buah	√	-	
27	Sound Sistem	1 unit	√	-	
28	Loud speaker	1 unit	√	-	
29	Brankas	1 unit	√	-	
30	Lemari kaca	1 unit	√	-	
31	CCTV	5 unit	√	-	
32	Mesin absensi	2 unit	√	-	
33	Pintu eletrik (Akses)	2 unit	√	-	
34	AC Portable	3 unit	√	-	
35	Kursi biasa	6 unit	√	-	
36	Kompor gas	3 unit	√	-	
37	Tabung gas	3 unit	√	-	
38	Tangga aluminium	1 unit	√	-	
39	Dispenser	2 unit	√	-	
40	Alat rumah tangga lain (hordeng)	1 paket	√	-	
41	Alat rumah tangga lain (mixer)	1 unit	√	-	
42	Alat Pemadam kebakaran	2 unit	√	-	
43	Microphone	8 unit	√	-	
44	Slide projector	3 unit	√	-	
45	Meja makan kayu	1 unit	√	-	
46	Kitchen Set	1 unit	√	-	
47	Blender	1 unit	√	-	
48	Alat dapur lainnya (oven)	1 buah	√	-	
49	Alat dapur lainnya (tempat makan prasmanan)	1 set	√	-	
50	Coffee maker	1 set	√	-	
51	Camera Video	1 buah	√	-	
52	Layar Film/Proyektor	1 buah	√	-	
53	Peralatan Antena	1 set	√	-	
54	Scanner	1 buah	√	-	

Prasarana masih diperlukan penambahan, baik untuk mengganti yang sudah rusak ataupun menambah yang sudah ada. Salah satu yang dirasakan masih kurang yaitu AC untuk pendingin ruangan, dikarenakan banyak terjadi kerusakan sehingga perlu AC baru untuk kenyamanan dalam bekerja. Penambahan mebeleur meja kerja dan kursi pegawai, mebeleur ruang rapat, serta perlunya lemari administrasi untuk menyimpan berkas berkas administrasi.

Penambahan komputer, laptop serta printer juga diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi.

Permasalahan terkait aset yang dimiliki diantaranya aset yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu pemakaiannya lama belum bisa dihapus dari daftar aset. Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan penghapusan aset, namun masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

C. Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak di daerah. Berbagai persoalan seperti ketimpangan gender, tingginya kasus kekerasan, serta belum optimalnya layanan perlindungan dan koordinasi lintas sektor, menuntut perhatian serius dan penanganan yang lebih terarah. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi isu-isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program yang responsif, efektif, serta mampu memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan :

1. Tingginya Ketimpangan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan
   - Masih adanya kesenjangan capaian IPG dan IDG.
   - Partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih rendah.
   - Belum optimalnya integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua OPD.
2. Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
   - Kasus KtP/A cenderung meningkat, termasuk kekerasan seksual, trafficking, eksploitasi, dan perundungan.
   - Rendahnya pelaporan akibat budaya patriarki, minimnya literasi hukum, dan ketakutan korban.
   - Koordinasi yang lebih harus ditingkatkan antara UPTD PPA, Kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya.

3. Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
   - Layanan pengaduan, pendampingan, rumah aman, dan rehabilitasi masih terbatas.
   - SDM pendamping (psikolog, pekerja sosial, paralegal) masih kurang.
   - Integrasi layanan berbasis aplikasi SIMFONI PPA belum maksimal.

4. Rendahnya Kualitas Pengasuhan dan Kerentanan pada Anak
   - Masih tingginya perkawinan anak.
   - Anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak terlantar, anak dengan disabilitas, dan anak rentan lainnya belum mendapatkan perlindungan memadai.
   - Lingkungan pengasuhan belum ramah anak.

5. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
   - Pemenuhan klaster KLA belum merata.
   - Masih rendahnya dukungan lintas sektor dan anggaran untuk KLA.
   - Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan masih lemah.

6. Minimnya Data Terpilah dan Sistem Informasi Gender dan Anak
   - Data terpilah (jenis kelamin, umur, disabilitas) belum tersedia lengkap pada banyak OPD.
   - Penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan belum optimal.
   - Integrasi data lintas sektor masih lemah.

7. Masih Kuatnya Budaya Patriarki dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
   - Norma sosial membatasi partisipasi perempuan dan mempengaruhi tingginya kasus kekerasan.
   - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak.
   - Minimnya kampanye perubahan perilaku yang berkelanjutan.

8. Penganggaran Responsif Gender (ARG) Belum Optimal
   - Banyak OPD belum menyusun GBS/GAB dan tidak menandai kegiatan responsif gender dalam SIPD.
   - Mekanisme ARG belum menjadi praktek standar.
   - Keterbatasan kapasitas aparatur dalam menyusun analisis gender.
9. Koordinasi Lintas Sektor Lemah dalam Isu Gender dan Anak
   - Masih ego-sektoral pada OPD terkait.
   - Penanganan kasus sering terfragmentasi.
   - Forum PUG dan Gugus Tugas KLA belum berjalan optimal.

10. Terbatasnya Anggaran untuk Program PPPA
   - Porsi anggaran untuk isu perempuan dan anak masih rendah.
   - Banyak program strategis belum dapat dilaksanakan secara optimal.
   - Ketergantungan pada dukungan mitra eksternal.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai respons langsung terhadap sepuluh isu strategis yang masih menghambat terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Pertama, untuk mengatasi tingginya ketimpangan gender, kebijakan diarahkan pada penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah, peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor, serta percepatan capaian IPG dan IDG melalui intervensi lintas bidang, terutama pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik.

Kedua, dalam menjawab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kebijakan difokuskan pada penguatan pencegahan, perluasan edukasi publik, peningkatan pelaporan yang aman, serta optimalisasi koordinasi antara UPTD PPA, kepolisian, dinas sosial, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan lembaga perlindungan lainnya.

Ketiga, terkait belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan

kualitas dan cakupan layanan UPTD PPA, penyediaan SDM pendamping yang kompeten (psikolog, pekerja sosial, paralegal), serta percepatan integrasi layanan berbasis SIMFONI PPA agar penanganan kasus lebih cepat, tuntas, dan terdokumentasi.

Keempat, untuk mengatasi kerentanan anak serta rendahnya kualitas pengasuhan, kebijakan menekankan pencegahan perkawinan anak, penguatan layanan bagi ABH, anak disabilitas, dan anak rentan lainnya, serta penguatan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan lingkungan pengasuhan yang ramah dan aman bagi anak.

Kelima, guna memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kebijakan diarahkan pada pemenuhan seluruh klaster KLA, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan gugus tugas KLA, serta optimalisasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pencapaian KLA di kabupaten/kota.

Keenam, dalam menjawab minimnya data terpilah gender dan anak, arah kebijakan menekankan pembangunan dan integrasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), peningkatan kapasitas OPD dalam penyediaan data terpilah, serta pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan kebijakan berbasis bukti.

Ketujuh, menghadapi masih kuatnya budaya patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat, kebijakan diarahkan pada penguatan kampanye perubahan perilaku, literasi kesetaraan gender, edukasi perlindungan anak, serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan dunia usaha dalam membentuk opini publik yang lebih adil gender.

Kedelapan, untuk memperbaiki penganggaran responsif gender (ARG), kebijakan menekankan penerapan analisis gender dalam penyusunan program dan kegiatan, peningkatan kapasitas perencana OPD dalam penyusunan GBS/GAB, serta peningkatan penandaan kegiatan responsif gender pada SIPD.

Kesembilan, dalam mengatasi lemahnya koordinasi lintas sektor, kebijakan diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi formal melalui Forum PUG dan Gugus Tugas KLA, integrasi SOP

penanganan kasus, serta peningkatan kolaborasi dengan lembaga layanan, dunia usaha, dan masyarakat.

Kesepuluh, untuk menjawab keterbatasan anggaran PPPA, arah kebijakan meliputi optimalisasi perencanaan berbasis prioritas, penguatan advokasi anggaran ke perangkat daerah dan legislatif, serta perluasan kemitraan dengan pemerintah pusat, lembaga donor, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini menegaskan komitmen Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, aman, adil gender, dan ramah anak, dengan memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan, pemenuhan hak, serta kesempatan yang setara dalam seluruh proses pembangunan daerah.

D. Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF,

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :

A. Gambaran Umum Organisasi
B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM OPD
C. Isu Strategis dan Arah Kebijakan
D. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari :

A. Penetapan Kinerja (PK)
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
C. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis OPD

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan berakhir di tahun 2023 dan selanjutnya diisi oleh Penjabat Gubernur, hal ini diitindaklankuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 periode keempat (tahap ke IV) yang merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka panjang dapat terlaksana dengan maksimal. Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan periode terakhir dimana untuk mencapai target RPJPD diakhir periode.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, ”**Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu,

5) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional,

6) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan,
7) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan
8) meningkatkan kapasitas manajeman kepemerintahan.

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi, arahan, serta agenda pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan visi, misi RPJMN, serta agenda pembangunan, visi RPJMN yang tertuang yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun (2024-2026). Implementasi dari RPD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan

6. **Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,** dengan indikator:
   - Laju Pertumbuhan Ekonomi
   - Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB (Juta Rp)
   - Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
   - Indeks Entropi Theil

7. **Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan**
   - Tingkat Kemiskinan
   - Gini Ratio

8. **Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan**
   - Indeks Pembangunan Manusia
   - Indeks Pembangunan Gender
   - Indeks Pembangunan Pemuda
   - Prevalensi Stunting

9. **Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana**
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
   - Persentase Penurunan Emisi GRK
   - Indeks Risiko Bencana Sumsel

10. **Peningkatan tata kelola pemerintahan**
    - Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menunjang pencapaian :

Tujuan Kedua : Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta

Tujuan Kelima : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
I	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,00	93,3	93,5
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,00	75,50	76,00
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,00	64,00	66,00
		1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	22,00	24,00	27,00
			Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	%	57,15	57,65	58,00
			Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,80	35,90	36,00
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	54,50	55,00	56,00
		1.2 Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Nilai	8 – 10	8 - 10	8 – 10

			Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	Nilai	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68,00	69,00	70,00
		1.3 Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,00	59,00	60,00
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00-85,00)	A (81,00-85,00)	A (81,00-85,00)

2. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) per urusan pemerintahan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	2024	
				Target	Realisasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0.9	22	42.08
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	per 10.000 anak	0.91	0,75-1,5	1.32
3	Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non pemerintah)	%	56.15	57.15	54.24
4	Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35.37	35.8	14.58
5	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan	%	54.54	54.5	55.54
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak	%	67.79	68	71.14
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.35	92.38	93.25
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73.88	74.17	76.58
9	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	21.33	22.67	24
10	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persen	56.15	56.59	54.24
11	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	Persen	34.79	34.82	34.4
12	Persentase Kab/Kota Yang Mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Persen	70.59	88.24	88.24
13	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	(belum rilis)	71.10	62.01
14	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per 10.000 Perempuan Termasuk TPPO	Persen	4.85	8-10	6.15
15	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan Yang Ditangani Secara Komprehensif	Persen	100	100	100
16	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Secara Komprehensif	Persen	100	100	100

3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri atas 7 Program, 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

iv. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

v. Administrasi Umum Perangkat Daerah

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

viii. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

ix. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

21. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

x. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

22. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
23. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
24. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3) Program Perlindungan Perempuan

xi. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

25. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

xii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

27. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

28. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Peningkatan kualitas Keluarga

xiii. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

29. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

xiv. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

30. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

xv. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

31. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
32. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6) Program Pemenuhan Hak Anak

xvi. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
34. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

xvii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

35. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

7) Program Perlindungan Khusus Anak

xviii. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
37. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

xix. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

38. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

xx. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

39. Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi

40. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, melalui pencapaian indikator sebagai berikut :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN SAASARAN KINERJA DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	22,00
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,50
	Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,80
	Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	%	57,15

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Nilai	8,00-10,00
	Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	0,75 – 1,50
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68,00
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	81,00-85,00 (A)

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program :

TABEL 2.5
RENCANA ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (INDUK)	ANGGARAN (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan keluarga	• Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	• Rp. 1.060.000.000,- • Rp.140.000.000,-	• Rp. 999.250.000,- • Rp. 140.000.000,-
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	• Rp. 345.000.000,- • Rp.650.000.000,-	• Rp. 315.000.000,-,- • Rp. 650.000.000,-
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	• Program Pemenuhan Hak Anak • Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Rp. 303.000.000,- • Rp. 182.423.000,-	• Rp. 303.000.000,- • Rp. 182.423.000,-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Rp. 9.150.656.691,-	• Rp. 8.979.903.000,-
		Total Anggaran	• Rp 11.831.079.691,-	• Rp11.569.576.000,-

Pencapaian keempat sasaran strategis dilakukan melalui pelaksanaan 6 Program teknis ditambah 1 program penunjang (kesekretariatan).

C. Rencana Anggaran

1. Belanja APBD Perangkat Daerah;

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Belanja Daerah **: Rp. 11.831.079.691,-**

Belanja Operasi **: Rp. 11.707.479.691,-**

- Belanja Pegawai : Rp. 6.875.385.891,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.832.093.800,-

Belanja Modal **: Rp. 123.000.000,-**

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 50.000.000,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 73.600.000,-

Dan kemudian pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Belanja Daerah **: Rp. 11.569.576.000,-**

Belanja Operasi **: Rp. 11.445.976.000,-**

- Belanja Pegawai : Rp. 6.693.402.200,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.752.573.800,-

Belanja Modal **: Rp. 123.000.000,-**

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 50.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 73.600.000,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 20 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1	2		3
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**8,979,903,000**
	i	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**10,000,000**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
	ii	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7,421,302,200**
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,512,082,200
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675,700,000
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183,520,000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35,000,000**
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000
	iv	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**35,000,000**
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000
	v	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**700,000,800**
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,000,800
	vi	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**410,000,000**
	15	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275,000,000
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,000,000
	vii	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**368,600,000**

	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	275,000,000
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,600,000
II	**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**999,250,000**
	viii	**PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI**	**200,000,000**
	21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200,000,000
	ix	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI**	**80,000,000**
	22	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	80,000,000
	x	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI**	**719,250,000**
	23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630,000,000
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70,000,000
	25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	19,250,000
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**315,000,000**
	xi	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120,000,000**

	26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40,000,000
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80,000,000
	xii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI**	**195,000,000**
	28	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135,000,000
	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	60,000,000
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**182,423,000**
	xiii	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**150,000,000**
	30	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000
	xiv	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32,423,000**
	31	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,423,000
V	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**140,000,000**
	xv	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.**	**140,000,000**
	32	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110,000,000

	33	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30,000,000
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**		**303,000,000**
	xvi	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI**	**135,000,000**
	34	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50,000,000
	35	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	85,000,000
	xvii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**168,000,000**
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168,000,000
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**650,000,000**
	xviii	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota**	**90,000,000**
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50,000,000
	38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	40,000,000
	xix	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI**	**30,000,000**
	39	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30,000,000

	xx	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**530,000,000**
	40	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30,000,000
	41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500,000,000
		Jumlah : 41 Sub Kegiatan	**11,569,576,000**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang secara rinci. Uraian dari hasil kinerja pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yaitu :

TABEL 3.1
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR UTAMA (IKU) DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen	22,00	42.08	191.27
		Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	Persen	57.15	54.24	94.91
		Persentase perempuan pada jabatan struktural	Persen	35.8	36.59	102.21
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	54.5	55.35	101.56
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Rasio	8-10 (capaian negatif, semkin kecil semakin baik)	6.15	130.08

		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68	71.11	104.57
		Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak (capaian negatif, semkin kecil semakin baik)	Rasio	0,75-1,5 (capaian negatif, semkin kecil semakin baik)	1.32	113.64
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58	60.19	103.78
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A(81,00-85,00)	84.52	99.44
Total Rata Rata						115,72

Uraian pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**, melalui indikator :

   a. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung

   Pengarusutamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

   Strategi utama yang dilaksanakan untuk mengawal agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan sama besar baik laki-laki maupun perempuan Pengarustamaan Gender yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan

Gender (PUG). Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender dilakukan melalui Pelaksanaan **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).**

Pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namum dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistim perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistim penganggaran dengan menggunakian instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008.

Pemerintah provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender dapat menggunakan gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS) atau analisis gender lainnya.

Analisis gender masih banyak dimaknai sebagai penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin belaka. Data terpilah tersebut memang pembuka wawasan, titik awal untuk melihat ada tidaknya dan di mana letak kesenjangannya. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah menemukan penyebab kesenjangan gendernya, apakah dari sisi implementasi kebijakan yang berjalan, dari internal lembaga, ataupun eksternal. Setelah ditemukan akar masalahnya, barulah ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan untuk mengatasinya.

Yang disebut dengan anggaran responsif gender yaitu anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :

a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari pogram pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Tahun 2024 yaitu dari Target sebesar 22,00% terealisasi sebesar 42,08% atau 191,27%. Target tersebut merupakan target dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026.

Capaian persentase yang mendekati 100 diartikan sebagai suatu capaian dimana kegiatan pada belanja operasi dan belanja modal pada APBD telah memperhatikan akses, partisipasi, control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki atau semakin tidak ada kesenjangan gender di dalamnya.

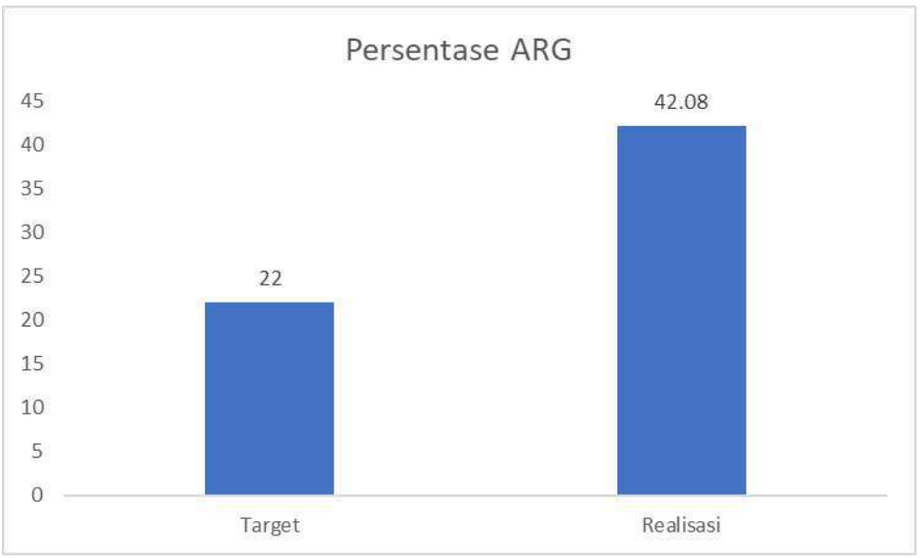

Gambar 1 Persentase ARG, Target dan Capaian 2024

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi kewenangan wajib pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan provinsi. Urusan-urusan yang diserahkan ke provinsi yaitu: Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas Keluarga, Sistim data dan anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak. Salah satu kewenangan tersebut adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi, artinya strategi PUG dalam semua pembangunan di lingkup provinsi menjadi urusan/kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2020 ada dua kebijakan baru yang dikeluarkan terkait pelaksanaan PUG yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 dan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di daerah Selain itu terkait kelembagaan dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan, Tim Teknis PUG dan pembentukan Focal Point di OPD Provinsi.

Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya yaitu Capaian 2019, 2020, 2021,2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut :

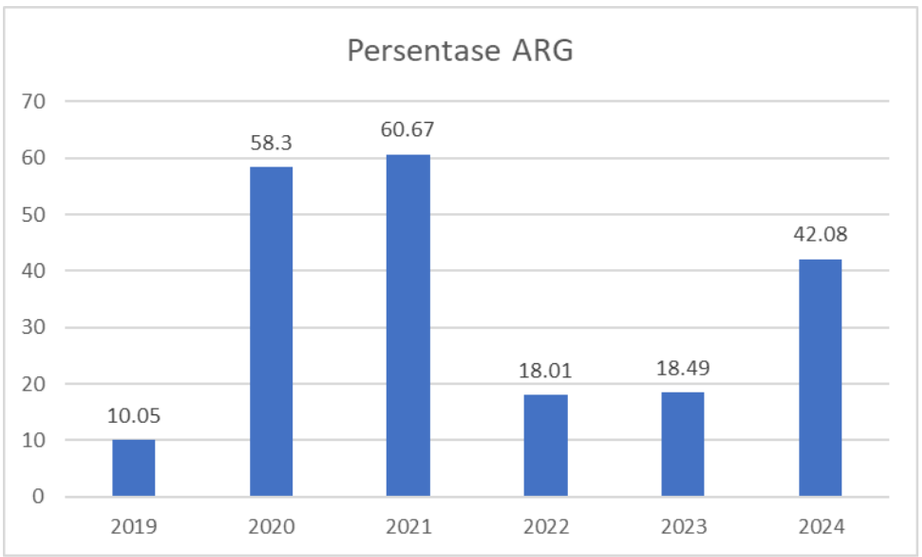

Gambar 2 Persentase ARG pada BL APBD,
Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021,2022,2023 dan 2024

Capaian Perhitungan Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD di Tahun 2019 dilakukan Penghitungan ARG hanya kepada Kegiatan yang telah dilakukan Analisis gender melalui GAP/GBS, sedang pada tahun 2020 dan 2021 juga dilakukan melalui pendekatan Program Kegiatan yang mendukung ***Sustainable Developmet Goals (SDGs)*** dan Kebutuhan Spesifik (laki-laki/perempuan/penanganan pandemi COVID-19).

Adanya perubahan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam struktur belanja APBD tidak lagi dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, menjadi Belanja APBD, yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Untuk Capaian Tahun 2021 Perhitungan Persentase ARG pada Belanja langsung APBD metode perhitungan Jumlah

ARG dibandingkan dengan Total Belanja Operasi (Belanja Barang Jasa) ditambah Belanja Modal.

Sedangkan untuk perhitungan capaian Tahun 2022 dan seterusnya sampai tahun 2024 berdasarkan hasil Kortekrenbang bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri bahwa perhitungan ARG hanya kepada Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilakukan Analisis gender dibuktikan melalui GAP/GBS yang ditanda tangani/disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Untuk pembanding diambil sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Anggaran Daerah yaitu Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa termasuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja Modal, tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bunga.

b. Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)

Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi, dan manajerial non-pemerintah adalah persentase perempuan yang bekerja di sektor swasta atau non-pemerintah dalam jabatan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tinggi, atau tanggung jawab kepemimpinan/strategis. Proporsi ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana perempuan **mendapat kesempatan yang setara** dalam posisi strategis dan profesi unggulan.

Pada tahun 2024 (tahun n-1) Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi, dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan sebesar 54,24% dari target 57,15% atau capaian sebesar 94,91%.

Gambar 3. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan, Target dan Capaian 2024 (tahun n-1)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi, dan manajerial di sektor (non-pemerintah) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun tantangan struktural dan kultural masih menjadi kendala.

Pada tahun 2019 proporsi perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi dan manajerial di sektor (non pemerintah) diangka 55,28 %, menurun menjadi 54,37 % di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 pada angka 56,15 %, menurun sedikit jauh di tahun 2022 menjadi 53,02 % dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 54,24 %.

Capaian proporsi perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi dan manajerial di sektor (non pemerintah) tahun 2019 -2023 selalu berada di atas capaian nasional.

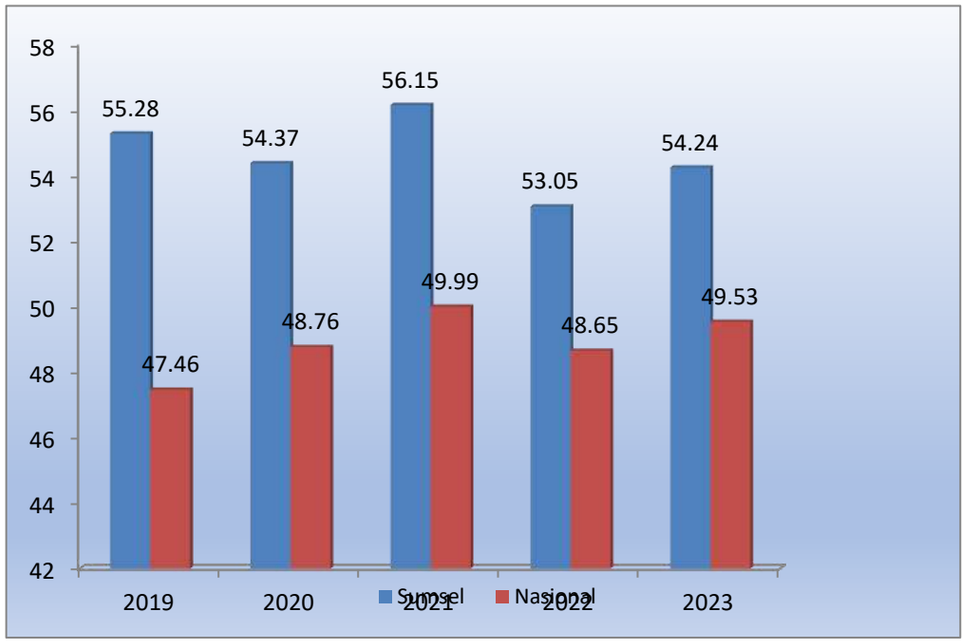

Gambar 4. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan dan Nasional, 2019 – 2023

Perempuan mulai mengambil peran strategis di berbagai sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, hingga keuangan. Mereka tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi pengambil keputusan dan penggerak utama dalam pembangunan sektor swasta maupun organisasi masyarakat sipil.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan, kesenjangan gender masih terlihat, terutama dalam jenjang kepemimpinan dan sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Oleh karena itu, upaya afirmasi dan pemberdayaan harus terus dilakukan melalui pelatihan vokasi, akses ke pendidikan tinggi, dan kebijakan perusahaan yang mendukung kesetaraan gender.

Peningkatan proporsi perempuan di sektor profesional dan teknikal bukan hanya mencerminkan kemajuan kesetaraan gender, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap produktivitas dan daya saing daerah. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar potensi perempuan dapat dioptimalkan secara maksimal.

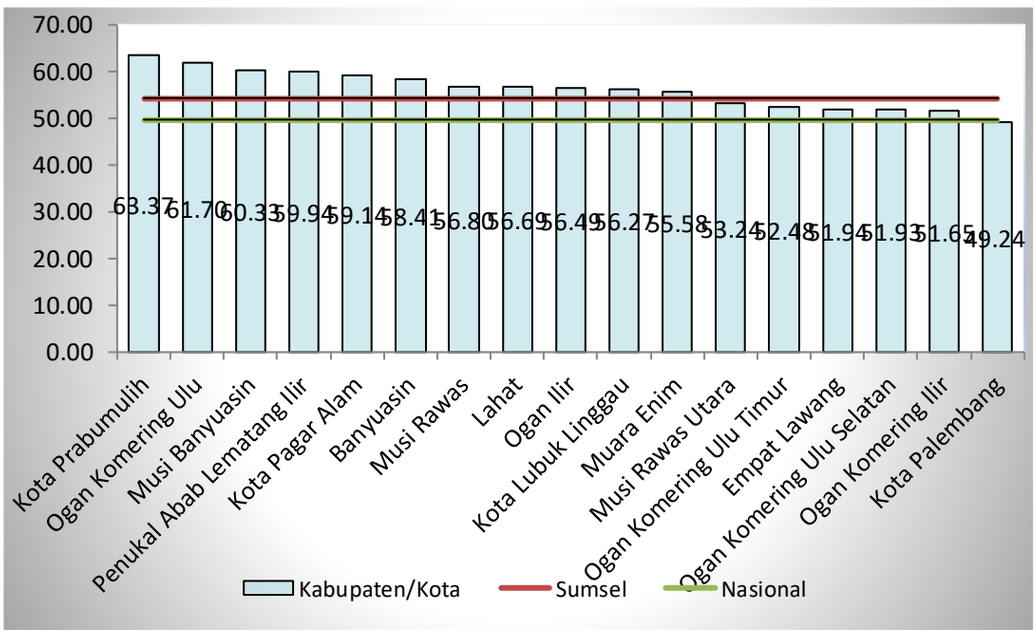

Gambar 5. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Tingkat Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2024 (tahun n-1)

Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya pada bidang profesional, teknisi, dan manajerial, menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan pembangunan. Di Provinsi Sumatera Selatan, proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajerial menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota

Dari 17 Kab/Kota Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2023 hanya kota Palembang yang berada di bawah capaian Nasional dan 6 Kab/Kota di bawah capaian Provinsi yaitu Muratara, OKUT, Empat Lawang, OKUS, OKI dan Palembang. Upaya peningkatan kapasitas, pelatihan vokasi, penyediaan lingkungan kerja yang ramah gender, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat keterlibatan perempuan dalam posisi kerja profesional di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

c. Persentase perempuan pada jabatan struktural

Persentase perempuan pada jabatan struktural merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam sistem birokrasi, khususnya dalam promosi jabatan dan pengisian posisi strategis.

Peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural—baik sebagai pejabat eselon maupun posisi manajerial lainnya—menjadi refleksi dari komitmen pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, kompetensi, dan peluang yang setara untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural terhadap total keseluruhan pejabat struktural, yang dinyatakan dalam persentase. Data ini penting untuk memantau perkembangan inklusi gender di sektor pemerintahan serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan afirmatif dan strategi peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pejabat struktural yang telah terisi adalah **1.279 orang**, terdiri dari **811 laki-laki (63,41%)** dan **468 perempuan (36,59%)**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat sedikit peningkatan dalam persentase perempuan pada jabatan struktural, dari **36,54%** di tahun 2023 menjadi **36,59%** di tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan tren positif terhadap upaya pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan daerah.

Secara rinci, jabatan struktural yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah pada **Eselon IV.a** dengan **378 perempuan dari total 910 pejabat**, atau setara dengan **41,54%**. Namun, pada eselon-eselon yang lebih tinggi (seperti II.a dan II.b), jumlah perempuan masih sangat rendah, menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam posisi pengambil keputusan strategis.

Tabel 3.2 Komposisi Jabatan Struktural Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024

Esselon	Jabatan yang Terisi berdasarkan Jenis Kelamin					
	2023			2024		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
V.a	0	0	0	0	0	0
V.b	0	0	0	0	0	0
IV.a	555	404	959	532	378	910
IV.b	1	0	1	1	0	1
III.a	178	68	246	159	68	227
III.b	82	15	97	75	16	91
II.a	34	5	39	35	4	39
II.b	7	2	9	8	2	10
I.a	0	0	0	0	0	0
I.b	1	0	1	1	0	1
Total Jumlah	858	494	1352	811	468	1279
Persentase (%)	63.46	36.54		63.41	36.59	

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2024, persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, kesenjangan gender masih nyata terutama di jabatan tinggi. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong program

peningkatan kapasitas dan peluang kepemimpinan bagi perempuan guna menciptakan birokrasi yang inklusif dan setara."

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara umum merupakan rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja. Akan tetapi, apabila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yaitu Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk perempuan usia kerja. Pada Tahun 2024 capaian Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 54,50 dari target sebesar 55,35 atau 101.56%.

Gambar 6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Perbandingan Target dan Capaian 2024

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, umur dan keinginan bekerja. Sedang faktor ekternal meliputi dukungan suami, keputusan keluarga, kehadiran anak, pendapatan suami, upah yang tinggi dan status perkawinan (Eliana N & Ratina, 2007).

Walau pun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki- laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut Borjas (2013) upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi perempuan membuat keputusan untuk memasuki dunia tenaga kerja atau memutuskan untuk mengurus rumah.

Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan

status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjanya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gab pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Dalam periode lima tahun terakhir, **TPAK perempuan di Sumatera Selatan** mengalami fluktuasi. **Tahun 2020:** TPAK Perempuan sebesar **54,25%**, **Tahun 2021**: Mengalami kenaikan menjadi **54,54%**, **Tahun 2022**: Menurun ke titik terendah yaitu **53,32%**, **Tahun 2023**: Melonjak tajam ke **55,54%** dan **Tahun 2024**: Sedikit menurun menjadi **55,35%**, namun tetap lebih tinggi dibanding 2020–2022

Peningkatan signifikan dari 2022 ke 2023 mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau program strategis yang berhasil mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2024, tren secara umum tetap positif.

Ke depan, penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemangku kepentingan untuk mempertahankan momentum ini dengan memperluas akses perempuan terhadap pelatihan kerja, kewirausahaan, dan lapangan kerja yang ramah gender.

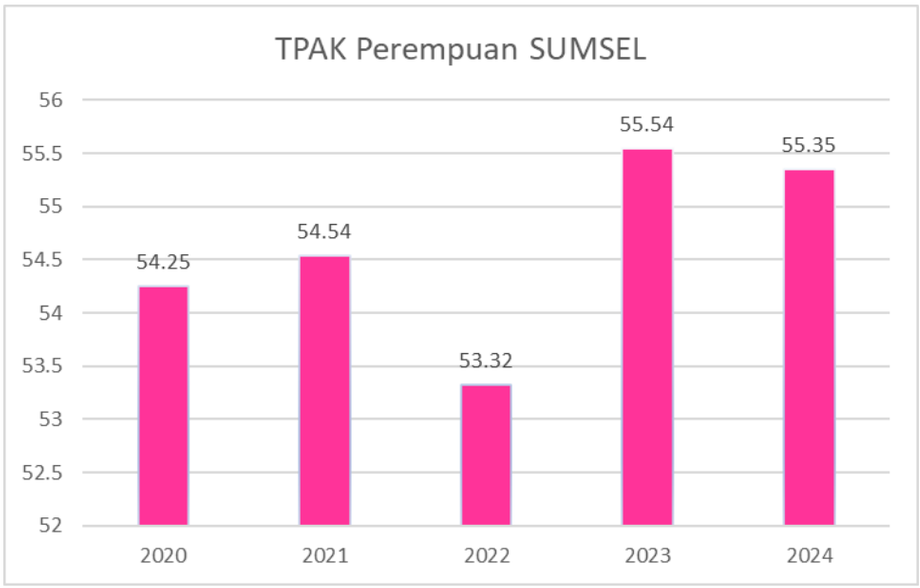

Gambar 7 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 2020-2024

Secara wilayah, terdapat variasi tingkat partisipasi yang cukup signifikan di antara kabupaten/kota. Kabupaten dengan TPAK perempuan tertinggi adalah:

- **Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** sebesar **61,23%**
- **Empat Lawang** sebesar **61,05%**
- **Ogan Ilir** sebesar **59,55%**

Sementara itu, tingkat partisipasi terendah tercatat di:

- **Banyuasin** dengan **50,62%**
- **Musi Banyuasin** sebesar **52,08%**
- **Musi Rawas** sebesar **53,29%**

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di dunia kerja, masih dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama di daerah-daerah dengan angka partisipasi yang masih relatif rendah. Program pelatihan keterampilan kerja, penguatan ekonomi perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dapat menjadi strategi kunci ke depan.

Tabel 3.3 TPAK Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Kabupaten/Kota

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (%)							
	Laki-laki				Perempuan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SUMATERA SELATAN	82,66	84,95	85,39	85,79	54,54	53,32	55,54	55,35
Ogan Komering Ulu	84,07	86,48	85,92	84,94	55,24	52,62	58,76	56,98
Ogan Komering Ilir	84,94	86,3	85,62	88,03	53,74	50,52	52,09	50,50
Muara Enim	83,65	85,94	86,62	86,88	55,18	58,85	58,86	57,73
Lahat	81,67	83,88	84,92	85,02	56,97	57,12	64,23	60,39
Musi Rawas	86,37	85,95	83,66	89,56	53,94	51,38	52,32	59,03
Musi Banyuasin	85,28	88,19	89,45	86,04	52,27	53,23	54,79	52,71
Banyu Asin	84,55	85,52	84,46	87,78	45,73	42,33	39,8	41,94
Ogan Komering Ulu Selatan	89,08	90,2	89,93	92,37	61,48	53,57	60,02	66,58
Ogan Komering Ulu Timur	86,73	86,33	90,11	89,67	55,24	48,84	62,3	63,99
Ogan Ilir	79,56	88,89	84,29	88,71	57,59	73,46	62,29	67,11
Empat Lawang	82,14	84,71	82,43	85,96	61,98	56,97	61,79	69,56
Penukal Abab Lematang Ilir	80,75	88,33	88,2	88,09	65,65	71,44	70,48	69,85
Musi Rawas Utara	80,92	88,44	85,02	83,99	58,43	57,71	54,73	55,97
Kota Palembang	75,9	79,19	82,13	79,03	52,21	50,09	53,04	46,24
Kota Prabumulih	79,76	84,02	82,52	82,64	59,09	59,5	54,7	58,38
Kota Pagar Alam	85,21	86,7	86,97	88,35	62,63	58,84	60,18	67,43
Kota Lubuklinggau	86,85	80,63	83,83	82,51	60,49	55,38	57,88	59,92

Hambatan Peningkatan Kulitas Hidup Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama dan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota

mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.

- Belum semua Kabupaten/Kota memiliki rencana aksi daerah dan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di daerahnya
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point di OPD.
- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data gender yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui strategi Pengarustamaan Gender antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG
- Melakukan pendampingan kepada kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan membuat Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS).
- Mendorong terbentuknya Focal Point di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di Organisasi Perangkat Daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.
- Mendorong agar OPD dan *stakeholders* agar membuat Data Terpilah
- Mendorong, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga
- Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi perempuan.
- Meningkatkan jejaring sinkronisasi, koodinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
  - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak.
  - Bersinergi dengan berbagai forum/organisasi baik yang diinisiasi pembentukannya seperti Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Sumsel atau organisasi lembaga layanan perempuan yang telah ada di Sumsel.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarustamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender . Selain itu perlu diperkuatnya ketahanan keluarga untuk meningkatkan berbagai capaian dimensi pembangunan khususnya di sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi agar terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui :

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi,
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.
    - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi,
    - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
    - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
    - Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
    - Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Pemerintah baik di Pusat dan Daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender. Hal tersebut ditunjukan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sehingga sasaran meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki akan tercapai.

2. **Sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak**, melalui indikator :

a. **Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan)**

Kondisi Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan) Tahun 2024 sebesar 6,15 dari target 8-10 sebesar atau 130,08. Data ini berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) yang diambil pada Januari 2024 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.

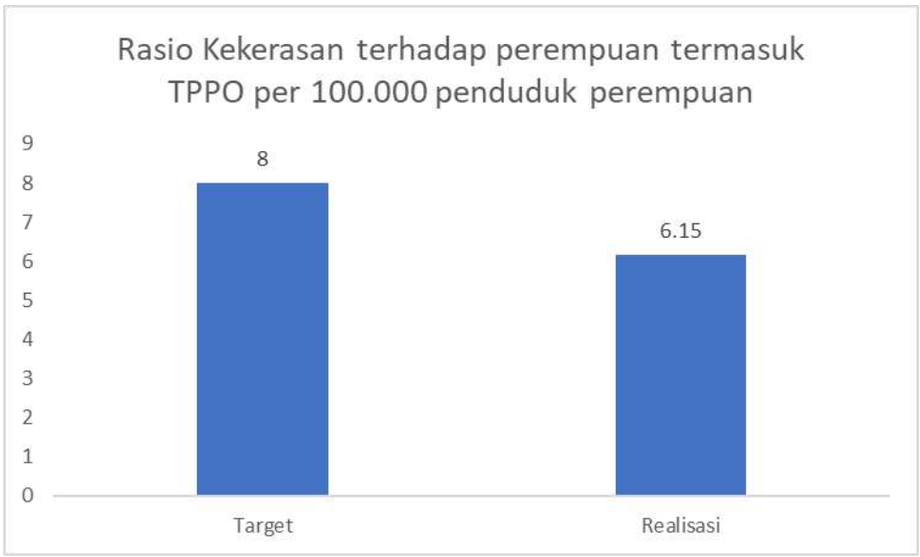

Gambar 8 Chart Rasio Perempuan Korban kekerasan Target dan Capaian 2023

Jumlah korban kekerasan perempuan (usia>18 tahun) pada Tahun 2024 sebanyak 188 orang dari total 545 Kasus kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan tercatat di Aplikasi Simfoni.

Tabel 3.4 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan								
Tahun 2024								
No	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					
			Anak			Dewasa		
			L	P	T	L	P	T
1	Ogan Ilir	81	23	28	51		31	31
2	Ogan Komering Ilir	62	13	25	38	1	29	30
3	Lahat	61	10	21	31	1	25	26
4	Musi Rawas	37	5	22	27	1	18	19
5	Kota Palembang	37	4	21	25	7	10	17
6	Kota Lubuk Linggau	37	10	16	26	1	16	17
7	Penukal Abab Lematang Ilir	36	9	16	25	2	14	16
8	Ogan Komering Ulu Selatan	34	3	20	23		12	12
9	Banyu Asin	32	4	31	35		10	10
10	Muara Enim	30	7	14	21		8	8
11	Kota Pagar Alam	29	1	16	17		5	5
12	Ogan Komering Ulu	19	3	12	15		4	4
13	Musi BanyuAsin	18	6	7	13	2	1	3
14	Kota Prabumulih	14	7	9	16		3	3
15	Ogan Komering Ulu Timur	10	2	5	7		2	2
16	Empat Lawang	4		4	4			
17	Musi Rawas Utara	4	3	4	7			
	Total	545	110	271	381	15	188	203

Tabel 3.5 **RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Kab/Kota	Penduduk Perempuan	Korban Perempuan	Kasus Perempuan	Rasio (Per 100.000 Penduduk Perempuan)
1	Ogan Komering Ulu	129.607	4	4	3,09
2	Ogan Komering Ilir	267.132	31	31	11,60
3	Muara Enim	218.415	8	8	3,66
4	Lahat	151.409	25	26	16,51
5	Musi Rawas	143.761	12	12	8,35
6	Musi BanyuAsin	238.642	3	2	1,26
7	Banyu Asin	295.364	5	5	1,69
8	Ogan Komering Ulu Selatan	136.548	10	10	7,32
9	Ogan Komering Ulu Timur	238.668	1	3	0,42
10	Ogan Ilir	151.372	29	30	19,16
11	Empat Lawang	121.706	0	0	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	68.777	10	17	14,54
13	Musi Rawas Utara	66.556	0	0	0,00
14	Kota Palembang	624.135	16	17	2,56
15	Kota Prabumulih	71.116	2	2	2,81
16	Kota Pagar Alam	51.713	14	16	27,07
17	Kota Lubuk Linggau	83.623	18	19	21,53
Jumlah		**3.058.544**	**188**	**202**	**6,15**

Sumber Data : Aplikasi Simfoni PPA dan PDAK-Kemendagri RI

Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

$$\textbf{KtA} = \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah pendududuk perempuan}} \times 100.000$$

$$= \frac{188}{3.058.544} \times 100.000$$

$$= \mathbf{6,15}$$

Capaian 2024 sebesar 6,15 menurun dari capaian 2023 sebesar 6,19 meningkat dibanding capaian 2022 sebesar 5,25. Namun ada penurunan pada tahun 2021 yaitu 4,85, peningkatan Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) juga terjadi dari Tahun 2020 sebesar 6,74.

Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

Gambar 9 Rasio Perempuan Korban kekerasan Capaian, 2020 - 2024

b.Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak)

Capaian atau realisasi indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) tahun 2024 sebesar 1,32 dari target 0,75 – 1,50 atau persentase capaian 113,64%. Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

Kondisi Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2024 berdasarkan data yang didapat pada aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) pada bulan Januari 2024 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.

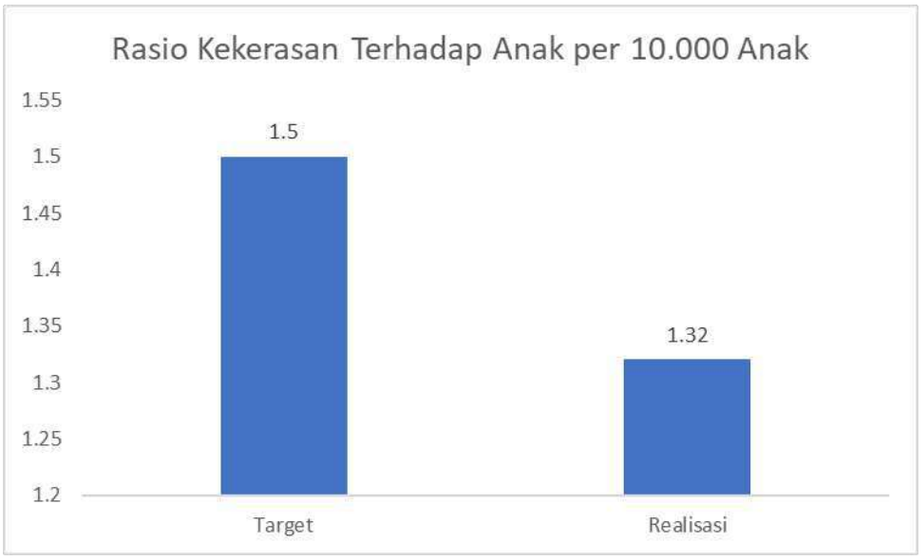

Gambar 10 Rasio Anak Korban Kekerasan Target dan Realisasi 2024

Jumlah anak korban kekerasan pada Tahun 2024 sebanyak 381 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah anak korban kekerasan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 **RASIO KEKERASAN TERHADAP ANAK PER 10.000 ANAKPROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Kab/Kota	Penduduk Anak	Korban Anak	Kasus Anak	Rasio (Per 10.000 Penduduk Anak 0-18 thn)	Korban Anak yang dilayani
1	Ogan Komering Ulu	125.343	15	15	1,20	15
2	Ogan Komering Ilir	253.546	31	31	1,22	31
3	Muara Enim	210.068	25	22	1,19	25
4	Lahat	139.848	38	36	2,72	38
5	Musi Rawas	135.237	25	25	1,85	25
6	Musi BanyuAsin	248.268	17	16	0,68	17
7	Banyu Asin	286.466	27	27	0,94	27
8	Ogan Komering Ulu Selatan	122.592	26	24	2,12	26
9	Ogan Komering Ulu Timur	208.186	7	7	0,34	7
10	Ogan Ilir	142.599	51	51	3,58	51
11	Empat Lawang	85.825	4	4	0,47	4
12	Penukal Abab Lematang Ilir	76.831	23	22	2,99	23
13	Musi Rawas Utara	69.675	7	4	1,00	7
14	Kota Palembang	570.092	21	20	0,37	21
15	Kota Prabumulih	72.177	16	12	2,22	16
16	Kota Pagar Alam	47.616	13	13	2,73	13
17	Kota Lubuk Linggau	81.175	35	22	4,31	35
Jumlah		**2.875.544**	**381**	**351**	**1,32**	**381**

Sumber Data : Aplikasi Simfoni PPA dan PDAK-Kemendagri RI

Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

$$\text{KtA} = \frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$$

$$= \frac{381}{2.875.544} \times 10.000$$

$$= \mathbf{1,32}$$

Capaian Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2024 sebesar 1,32 menurun dari tahun 2023 sebesar 1,47 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 1,04 meningkat disbanding Tahun 2021 sebesar 0,91 meningkat dari Tahun 2020 sebesar 0,84 dan Tahun 2019 sebesar 0,71. Jumlah korban kekerasan anak yang terlaporkan dan terlayani pada Tahun 2023 sebanyak 403 lebih banyak disbanding Tahun 2022 sebanyak 292 orang dan lebih banyak dibanding Tahun 2021 sebanyak 250 orang, lebih banyak dari Tahun 2020 sebanyak 240 orang.

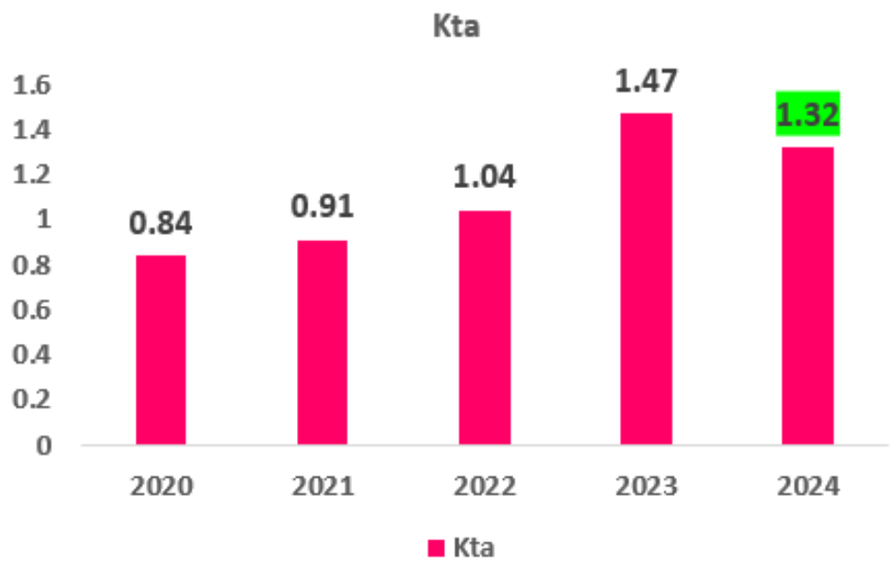

Gambar 11 Rasio Anak Korban Kekerasan Capaian 2020-2024

c. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat upaya perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. IPKA menjadi alat ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah, lembaga layanan, dan masyarakat memberikan perhatian, perlindungan, serta pelayanan terhadap anak-anak yang menghadapi kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.

Indeks ini mencakup beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, antara lain:

1. Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran,
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak penyandang disabilitas,
4. Anak korban bencana,
5. Anak dari kelompok minoritas dan terdiskriminasi,
6. Anak korban trafficking, dan lainnya sesuai dengan klasifikasi KemenPPPA.

Peningkatan nilai IPKA menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme perlindungan khusus anak berjalan secara efektif, termasuk melalui regulasi, kelembagaan, SDM terlatih, pelayanan yang responsif, serta sistem pelaporan dan pemulihan anak. Sebaliknya, rendahnya nilai IPKA dapat menjadi indikator masih lemahnya tata kelola perlindungan khusus anak, minimnya layanan ramah anak, atau terbatasnya intervensi pemerintah dalam kelompok rentan tersebut.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, nilai IPKA menjadi salah satu indikator strategis dalam upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Kinerja IPKA mencerminkan sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan

dalam memberikan jaminan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang berada dalam situasi paling rentan.

Kondisi Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2024 berdasarkan data tahun n-1 dengan capaian 71,11 dari target 68,00 atau 104,57 %.

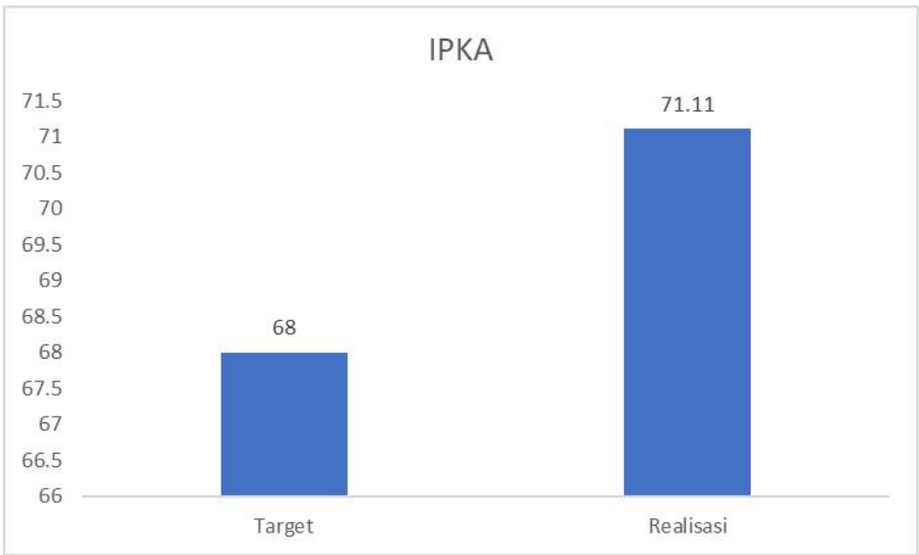

Gambar 12 Chart Indeks Perlindungan Khusus Anak Sumsel Target dan Capaian Tahun 2024 (tahun n-1)

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Provinsi Sumatera Selatan, terlihat adanya fluktuasi capaian selama periode tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, IPKA berada pada angka 71,40 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 hingga mencapai angka tertinggi sebesar 76,62. Namun, capaian tersebut menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 69,16 di tahun 2020 dan 67,79 di tahun 2021.

Pada tahun 2022, capaian IPKA kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi 71,14. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 71,11. Secara umum, meskipun terjadi beberapa penurunan, capaian IPKA di Sumatera Selatan tetap menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak, yang perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor

dan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak, khususnya dalam kategori perlindungan khusus.

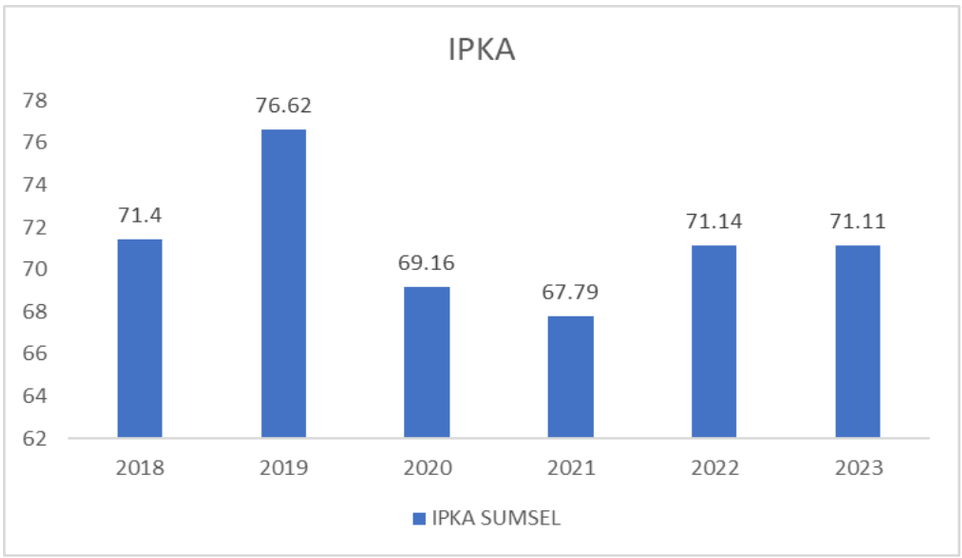

Gambar 13 Chart Indeks Perlindungan Khusus Anak Sumsel Capaian Tahun 2018-2023

Jika dibandingkan dengan IPKA Nasional, capaian Sumatera Selatan masih berada di bawah angka nasional. IPKA Nasional pada periode yang sama juga menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 77,03 dan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 73,11. Pada tahun 2023, IPKA Nasional mencapai 75,72, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

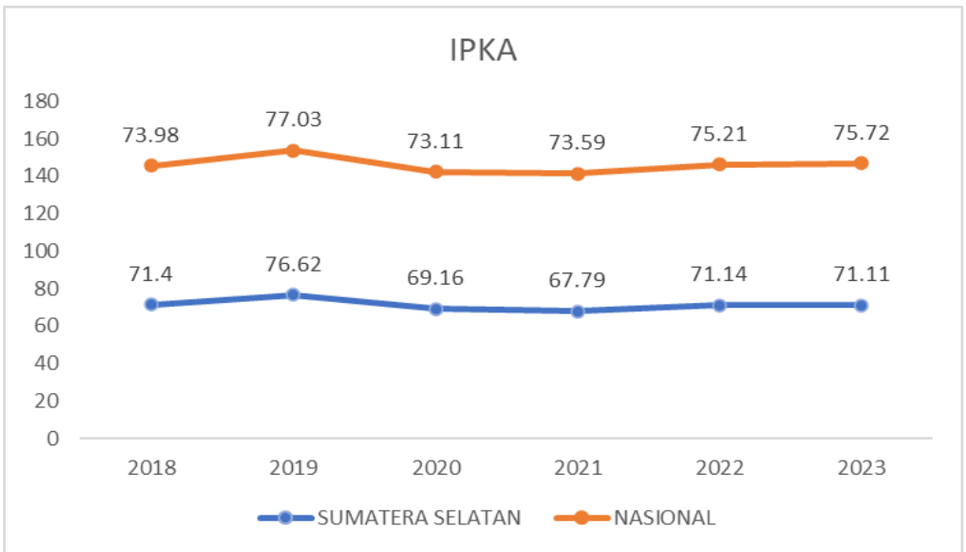

Gambar 14 Chart IPKA Sumsel dan Nasional Capaian Tahun 2018- 2023

Selama periode tiga tahun terakhir (2021–2023), terjadi peningkatan IPKA di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dari 67,79 pada tahun 2021 menjadi 71,14 di tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 71,110 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam perlindungan khusus anak secara umum di provinsi ini, meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,720 pada tahun 2023.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan capaian IPKA yang sangat baik. Kabupaten Musi Rawas Utara mencatatkan lonjakan signifikan dari 68,120 (2021) menjadi 83,880 (2023). Kabupaten Banyuasin juga menunjukkan progres luar biasa dari 63,330 (2021) menjadi 80,300 (2023), menjadi yang tertinggi di provinsi ini pada tahun 2023.

Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan dalam nilai IPKA. Misalnya, Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan dari 67,060 (2021) menjadi 57,730 (2023), yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kondisi perlindungan anak di wilayah tersebut.

Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki IPKA cukup tinggi, namun mengalami penurunan dari 80,240 (2021) menjadi 73,190 (2023). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program perlindungan anak di perkotaan yang memiliki kompleksitas sosial lebih tinggi.

Jika dilihat dari tren keseluruhan, mayoritas kabupaten/kota mengalami peningkatan IPKA, yang mencerminkan penguatan perlindungan anak di daerah, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, serta anak korban bencana dan konflik sosial.

Tabel 3.7 IPKA Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Kaupaten/Kota

No	Cakupan	Satuan	IPKA		
			2021	2022	2023
1	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Indeks	58,210	64,870	75,630
2	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Indeks	71,310	71,520	70,380
3	KABUPATEN MUARA ENIM	Indeks	68,010	69,740	72,600
4	KABUPATEN LAHAT	Indeks	76,800	75,570	72,480
5	KABUPATEN MUSI RAWAS	Indeks	79,460	71,020	74,730
6	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Indeks	71,100	68,610	76,970
7	KABUPATEN BANYU ASIN	Indeks	63,330	67,680	80,300
8	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	Indeks	70,400	69,450	73,180
9	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Indeks	72,410	71,330	70,110
10	KABUPATEN OGAN ILIR	Indeks	67,060	62,460	57,730
11	KABUPATEN EMPAT LAWANG	Indeks	60,690	56,980	65,250
12	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Indeks	60,690	62,320	62,070
13	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Indeks	68,120	80,640	83,880
14	KOTA PALEMBANG	Indeks	80,240	77,710	73,190
15	KOTA PRABUMULIH	Indeks	55,930	59,080	73,240
16	KOTA PAGAR ALAM	Indeks	59,850	68,330	70,210
17	KOTA LUBUKLINGGAU	Indeks	66,430	70,060	69,050
	SUMATERA SELATAN	Indeks	67,79	71,14	71,110
	NASIONAL		73,59	75,21	75,720

Kekerasan terhadap anak selama dan setelah pandemi COVID-19 meningkat. Hal ini karena rasa bosan, jenuh dan penat akibat aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah. Konten pornografi dan kekerasan di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak juga menjadi salah satu penyebab yang harus menjadi perhatian bersama. Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Perubahan kondisi finansial keluarga akibat pandemi COVID-19 akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal pada anak. Anak menjadi korban ledakan emosi orang tua sebagai pihak terdekat dan kecil kemungkinannya melakukan perlawanan balik.

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Bahkan, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa takut dan dalam keadaan pikiran yang tidak jelas yang tentu saja dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Hambatan

Peningkatan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak merupakan cross cutting issu atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Salah satu penyebab masih tingginya data angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain :

- Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabnya masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan serta belum optimalnya kesadaran masyarakat bahwa perempuan harusnya dilindungi bukan justru dijadikan korban kekerasan, kekurangan ekonomi serta efek dari kecanduan narkotika serta minuman keras.
- Kemajuan Teknologi membawa efek negatif penyebarluasan berita dan fenomena mengenai kekerasan.
- Belum optimalnya jejaring kerjasama lembaga layanan yang menangani masalah perempuan dan anak khususnya di daerah
- Belum optimalnya pencegahan tindak kekerasan yang melibatkan masyarakat.

Peluang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh kabupaten/kota di Sumsel dan beberapa telah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu di Provinsi Sumsel, dan 16 Kabupaten/Kota yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, PALI, Banyuasin, Muara Enim, Banyuasin, Prabumulih dan Ogan Ilir.

- Adanya sosialisasi tentang lembaga/instansi yang menangani kasus kekerasan di beberapa daerah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang,
- Jejaring kerjasama di Level Provinsi telah terjalin cukup baik dengan dibentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel.
- Petugas Lembaga Layanan Perempuan dan Anak telah melaksanakan penanganan kasus baik itu dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga lainnya di beberapa daerah.
- Telah adanya sistem pelaporan online kasus kekerasan atau yang disebut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (e-simfoni).

Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak

Berbagai upaya telah dilakukan untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya :

- Melakukan Advokasi ke seluruh Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun UPTD PPA.
- Melakukan sosialisasi baik ke Kabupaten/Kota, Organisasi Perempuan mau pun masyarakat Umum mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan terhadap Perempuan
- Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan.

- Meningkatkan kapasitas SDM Pelaksana baik Pencegahan maupun Penanganan.
- Mengoptimalkan pengisian aplikasi e-simfoni sehingga diperoleh penghitungan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang valid denganmelibatkan berbagai stakeholder seperti P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPPA Polda dan Polres, KPAID, dan Rumah Sakit.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

Program Perlindungan Khusus Anak melalui :

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan

Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

- Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi

Program Perlindungan Perempuan melalui :

- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. **Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak anak**, melalui indikator :

a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak dasar anak telah tercapai di suatu wilayah. Hak-hak tersebut mencakup hak sipil dan kebebasan,

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Di Provinsi Sumatera Selatan, IPHA menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai kinerja pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak anak. Berdasarkan data terbaru, capaian IPHA menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak anak secara menyeluruh.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai program intervensi seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, kampanye perlindungan anak, serta penguatan lembaga-lembaga perlindungan anak di tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal pemerataan akses terhadap layanan, terutama di wilayah terpencil dan rentan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat serta penguatan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan lokal untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Kondisi Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024 berdasarkan data tahun n-1 dengan capaian 60,19 dari target 58,00 atau 103,78 %.

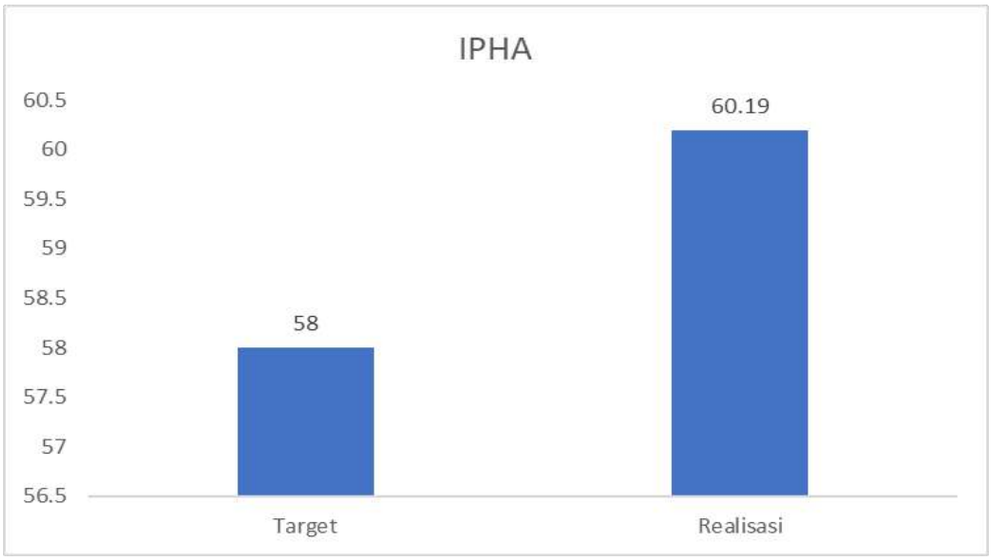

Gambar 15 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel Target dan Capaian Tahun 2024 (tahun n-1)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, IPHA tercatat sebesar **57,96**, kemudian mengalami peningkatan menjadi **60,48** pada tahun 2019 dan mencapai puncaknya di angka **62,69** pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi **56,94**, yang merupakan capaian terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya IPHA menjadi **60,26**, dan angka ini relatif stabil pada tahun 2023 dengan nilai **60,19**. Meskipun demikian, capaian tahun 2023 masih belum mampu melampaui angka tertinggi pada tahun 2020.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Sumatera Selatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor, serta dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021. Diperlukan strategi berkelanjutan untuk memastikan tren peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan hak anak di masa mendatang.

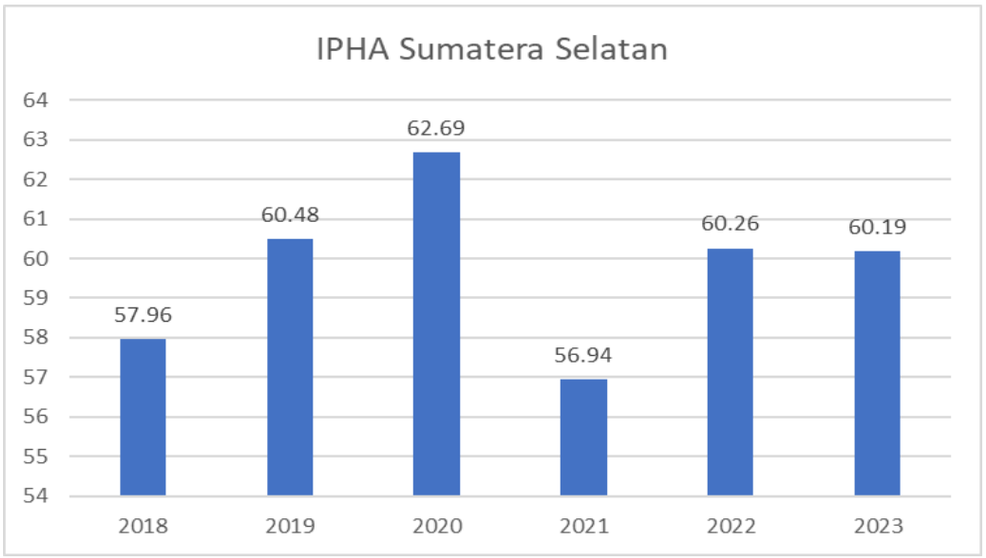

Gambar 16 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel Capaian Tahun 2018-2023

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, IPHA Sumatera Selatan tercatat sebesar 57,96, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 60,27. Kinerja IPHA provinsi meningkat pada tahun 2019 menjadi 60,48 dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan skor 62,69. Capaian ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang saat itu sebesar 65,56.

Namun, pada tahun 2021, IPHA Sumatera Selatan mengalami penurunan signifikan menjadi 56,94, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 58,34. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2022, di mana IPHA provinsi naik kembali ke angka 60,26, hampir sejajar dengan nasional yang berada di 60,33.

Pada tahun 2023, IPHA Sumatera Selatan mencapai 60,75, sedikit lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 60,19. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam upaya pemenuhan hak anak di wilayah ini, serta keberhasilan dalam mengejar dan melampaui capaian nasional setelah sempat berada di bawahnya.

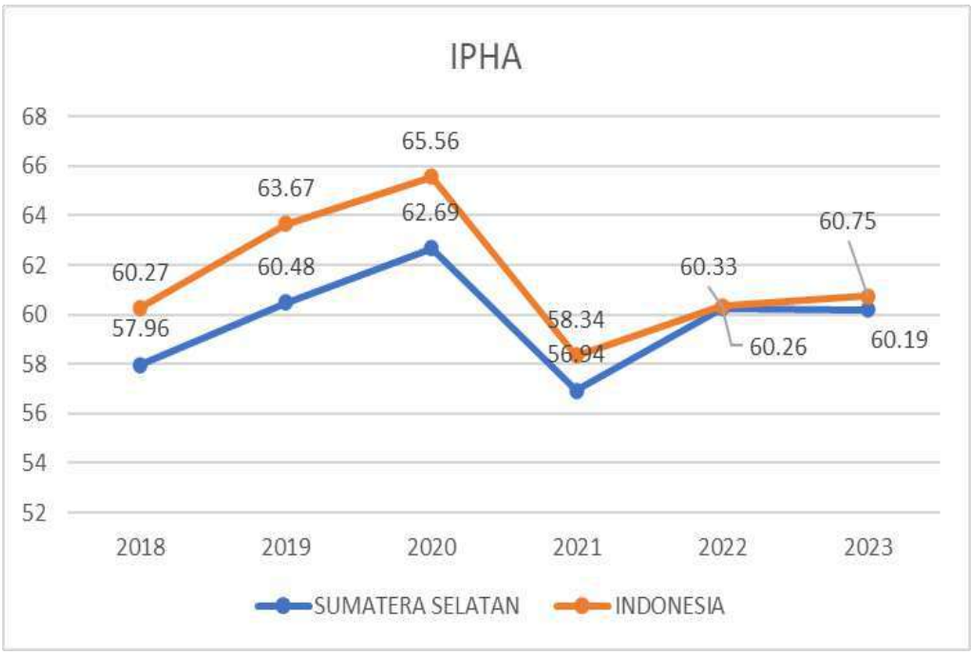

Gambar 17 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel dan Nasional Capaian Tahun 2018- 2023

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif selama tiga tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023. Berdasarkan data, nilai IPHA Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari **56,94 pada tahun 2021** menjadi **60,26 pada tahun 2022**, dan sedikit menurun menjadi **60,19 pada tahun 2023**.

Peningkatan signifikan terjadi di berbagai kabupaten/kota, seperti:

- **Musi Rawas**, yang meningkat dari **55,38 (2021)** menjadi **60,81 (2023)**,
- **Ogan Komering Ulu (OKU)**, dari **58,67 (2021)** menjadi **61,29 (2023)**, serta
- **Ogan Komering Ulu Timur**, yang stabil tinggi di atas angka 62 selama 3 tahun terakhir.

Namun, beberapa daerah masih menunjukkan capaian IPHA di bawah rata-rata provinsi, seperti:

- **Empat Lawang**, dengan capaian **52,50 pada 2023**, meskipun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya,
- **Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**, dengan IPHA **55,75 pada 2023**, dan
- **Musi Rawas Utara**, meski mengalami tren peningkatan dari **48,98 (2021)** menjadi **60,28 (2023)**.

Capaian ini mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar daerah yang perlu diatasi melalui strategi terpadu dan kebijakan afirmatif, terutama untuk wilayah-wilayah dengan indeks di bawah rata-rata provinsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperluas jangkauan program-program perlindungan dan pemberdayaan anak, guna mencapai target pemenuhan hak anak yang merata dan berkeadilan.

Tabel 3.7 IPHA Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Kaupaten/Kota

No	Cakupan	Satuan	IPHA		
			2021	2022	2023
1	OGAN KOMERING ULU	Indeks	58,670	62,420	61,290
2	OGAN KOMERING ILIR	Indeks	56,490	58,080	58,380
3	MUARA ENIM	Indeks	58,400	60,470	57,740
4	LAHAT	Indeks	59,460	63,150	63,790
5	MUSI RAWAS	Indeks	55,380	60,430	60,810
6	MUSI BANYUASIN	Indeks	54,040	58,450	59,860
7	BANYU ASIN	Indeks	56,880	57,760	57,220
8	OGAN KOMERING ULU SELATAN	Indeks	53,620	57,960	53,570
9	OGAN KOMERING ULU TIMUR	Indeks	62,060	63,020	62,550
10	OGAN ILIR	Indeks	56,280	59,520	59,680
11	EMPAT LAWANG	Indeks	48,060	58,220	54,520
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Indeks	49,040	58,950	55,750
13	MUSI RAWAS UTARA	Indeks	48,980	58,150	60,280
14	KOTA PALEMBANG	Indeks	63,190	63,620	62,160
15	KOTA PRABUMULIH	Indeks	55,520	62,710	64,890
16	KOTA PAGAR ALAM	Indeks	56,010	59,820	60,010
17	KOTA LUBUKLINGGAU	Indeks	59,680	62,190	62,490
	SUMATERA SELATAN	Indeks	56,94	60,26	60,190

Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Untuk mewujudkan suasana yang aman dan nyaman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhinya hak-hak anak serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya melalui dalam pemenuhan hak anak melalui Implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain :

a. Belum optimalnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan terkait Perlindungan Anak.
b. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang paham Konvensi Hak Anak sehingga implementasi pencapaian

indikator KLA melalui berbagai Program Kegiatan belum optimal.

c. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan berbagai indikator KLA.
d. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam melaksanakan perlindungan anak.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak

Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Memperkuat komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk percepatan KLA di setiap Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan khususnya yang termasuk dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan implementasi KLA;
3. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dengan Advokasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana dan *stakeholders*;
5. Meningkatkan sinronisasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi serta mengoptimalkan jejaring perlindungan anak, baik pemerintah, Lembaga Layanan Anak dan Forum Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024 dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Persentase Kabupaten/ Kota Menuju

Kabupaten/ Kota Layak Anak lewat Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) melalui :

Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak,

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Program Peningkatan Kualitas Keluarga,

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi, melalui indikator :

a.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan **SAKIP** tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 18 Siklus Proses dalam SAKIP

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientas kepada hasil *(result oriented goverment)* serta memberikan saran perbaikan.

Capaian atau realisasi indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 84,52 atau 99,42% dari target 81,00-85,00 masuk dalam kategori **“A” (memuaskan).**

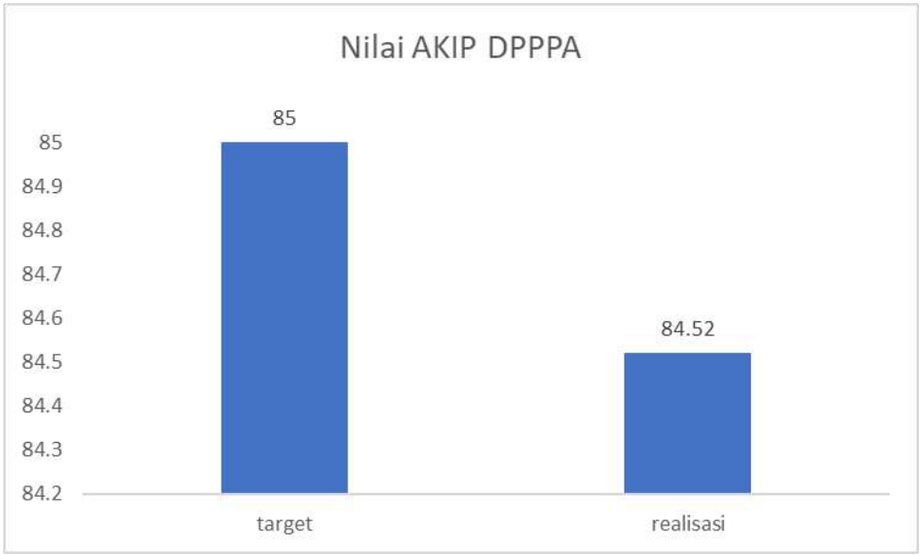

Gambar 19 Nilai SAKIP Target dan Realisasi 2024

Nilai tersebut berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Sesuai dengan surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/86.2/ITDAPROV.III/2024, Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada DPPPA Prov. Sumsel Tahun 2024.

Tabel 3.8 Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja DPPPA tahun 2024

No	**Komponen Penilaian**	**Bobot**	**Nilai**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,40
2	Pengukuran Kinerja	30	25,15
3	Pelaporan Kinerja	15	14,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	19,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Capaian 2023 sebesar 84,91 meningkat dibantingkan Capaian 2022 sebesar 84,54 meningkat dibanding capaian 2021 sebesar 80,29 turun sedikit dari capaian 2020 sebesar 80,48 dan meningkat dari capaian 2019 sebesar 78,74.

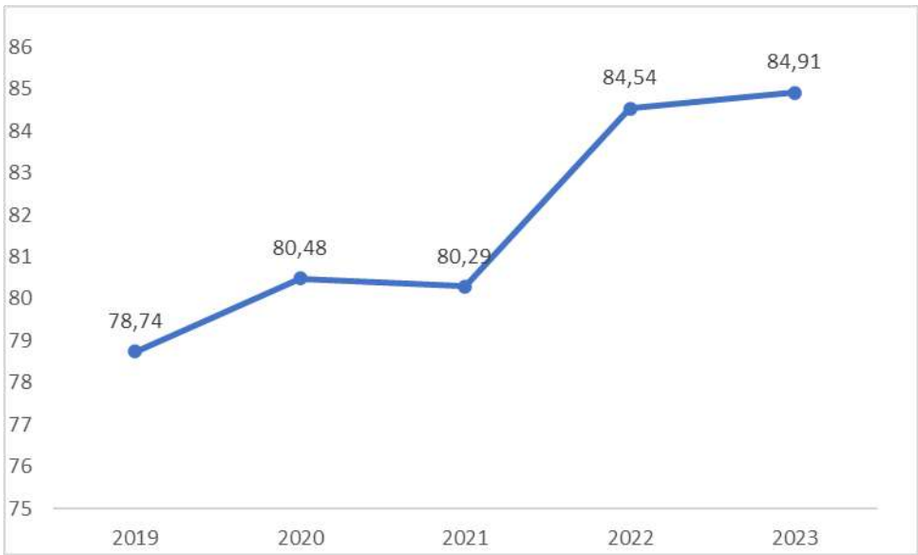

Gambar 19 Nilai SAKIP Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021,2022 dan 2023

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya.

Hambatan

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
b. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki

c. Masih kurang pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pegawai mengenai tugas pokok, fungsi, target kinerja serta tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja

Upaya yang Dilakukan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Untuk mengatasi masalah serta hambatan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan upaya yang sedangdan akan dilakukan antara lain :

1. Penambahan tenaga pegawai dari mutasi pegawai dan tambahan tenaga honor
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan lain-lain
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan stakeholders terkait
4. Mempererat koordinasi, sinkronisasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/kota
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta membangun ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi antara lain yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, melalui :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B.REALISASI ANGGARAN APBD DAN APBN

1. REALISASI APBD

Total Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

Belanja Daerah **: Rp. 11.569.576.000,-**

Belanja Operasi **: Rp. 11.445.976.000,-**

- Belanja Pegawai : Rp. 6.693.402.200,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.752.573.800,-

Belanja Modal **: Rp. 123.000.000,-**

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 50.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 73.600.000,-

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan sampai Desember Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Des	Realisasi s.d. Bulan Des	Target s.d Bulan Des	Realisasi
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	**11.569.576.000,-**	**11.038.708.314,-**	**100**	**95,41**	**100**	**100**
Belanja Operasi	**11.445.976.000,-**	**10.915.616.835,-**	**100**	**95,37**	**100**	**100**
- Belanja Pegawai	6.693.402.200,-	6.325.144.424,-	100	94,50	100	100
- Belanja Barang dan Jasa	4.752.573.800,-	4.590.472.411,-	100	96,59	100	100
Belanja Modal	**123.600.000,-**	**123.091.479,-**	**1 00**	**99,59**	**100**	**100**
- Belnja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,-	49.755.000,-	100	99,51	100	100
- Belanja Gedung dan Bangunan	73.600.000,;	73.336.479,-	100	99,64	100	100

1) **Realisasi Total Belanja**

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp. **11.569.576.000,-** , realisasi sebesar Rp.**11.038.708.314,-** atau 95,41 % dan realisasi fisik 100 %

2) **Realisasi Belanja Operasi**

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**11.445.976.000,-** terealiasi Rp.**10.915.616.835,-** atau 95,37% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp.6.693.402.200,- terealisasi Rp.6.325.144.424,- atau 94,50% dan realisasi fisik 100%
- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.752.573.800,- terealisasi Rp.4.590.472.411,- atau 96,59% dan realisasi fisik 100 %

3) **Realisasi Belanja Modal**

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**123.600.000,-** terealiasi Rp.**123.091.479,-** atau **99,59%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.50.000.000,- terealisasi Rp.49.755.000,- atau 99,51% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.73.600.000,- terealisasi Rp.73.336.479,- atau 99,64% dan realisasi fisik 100 %

-

Tabel Realisasi Anggaran Dinas PPPA Provinsi Sumsel
Tahun Anggaran 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realiasasi		
				Keuangan		Fisik
				Realisasi (Rp)	Persen (%)	Persen (%)
1	2		3	6		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**8,979,903,000**	**8,547,240,016**	**95.18**	**100**
	i	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**10,000,000**	**9,977,000**	**99.77**	**100**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	4,985,000	99.70	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,992,000	99.84	100
	ii	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7,421,302,200**	**7,050,268,480**	**95.00**	**100**
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,512,082,200	6,147,474,424	94.40	100
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675,700,000	672,981,000	99.60	100
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183,520,000	179,869,500	98.01	100
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,943,556	99.89	100
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35,000,000**	**22,820,000**	**65.20**	**100**
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000	22,820,000	65.20	100
	iv	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**35,000,000**	**34,663,778**	**99.04**	**100**
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000	34,663,778	99.04	100
	v	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**700,000,800**	**696,475,105**	**99.50**	**100**
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,973,000	99.82	100

	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,755,000	99.51	100
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000	158,419,560	99.01	100
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	39,914,000	99.79	100
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	19,149,000	95.75	100
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,000,800	414,264,545	99.82	100
	vi	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**410,000,000**	**369,149,614**	**90.04**	**100**
	15	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275,000,000	235,094,614	85.49	100
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,645,000	98.82	100
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,000,000	104,410,000	99.44	100
	vii	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**368,600,000**	**363,886,039**	**98.72**	**100**
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	275,000,000	270,654,560	98.42	100
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	19,895,000	99.48	100
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,600,000	73,336,479	**99.64**	**100**
II	**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**999,250,000**	**962,087,751**	**96.28**	**100**
	viii	**PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI**	**200,000,000**	**185,914,090**	**92.96**	**100**
	21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200,000,000	185,914,090	**92.96**	**100**
	ix	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI**	**80,000,000**	**78,129,340**	**97.66**	**100**

	22	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	80,000,000	78,129,340	**97.66**	**100**
	x	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI**	**719,250,000**	**698,044,321**	**97.05**	**100**
	23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630,000,000	611,642,986	**97.09**	**100**
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70,000,000	67,211,022	**96.02**	**100**
	25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	19,250,000	19,190,313	**99.69**	**100**
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**315,000,000**	**284,671,350**	**90.37**	**100**
	xi	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120,000,000**	**93,281,102**	**77.73**	**100**
	26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40,000,000	35,149,192	**87.87**	**100**
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80,000,000	58,131,910	**72.66**	**100**
	xii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN**	**195,000,000**	**191,390,248**	**98.15**	**100**

		KEWENANGAN PROVINSI				
	28	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135,000,000	133,062,248	**98.56**	**100**
	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	60,000,000	58,328,000	**97.21**	**100**
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**182,423,000**	**180,040,447**	**98.69**	**100**
	xiii	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**150,000,000**	**148,533,522**	**99.02**	**100**
	30	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000	148,533,522	**99.02**	**100**
	xiv	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32,423,000**	**31,506,925**	**97.17**	**100**
	31	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,423,000	31,506,925	**97.17**	**100**
V	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**140,000,000**	**130,404,460**	**93.15**	**100**
	xv	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.**	**140,000,000**	**130,404,460**	**93.15**	**100**
	32	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110,000,000	104,224,460	**94.75**	**100**

	33	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30,000,000	26,180,000	**87.27**	**100**
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**		**303,000,000**	**298,785,626**	**98.61**	**100**
	xvi	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI**	**135,000,000**	**133,694,164**	**99.03**	**100**
	34	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50,000,000	49,806,005	**99.61**	**100**
	35	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	85,000,000	83,888,159	**98.69**	**100**
	xvii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**168,000,000**	**165,091,462**	**98.27**	**100**
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168,000,000	165,091,462	**98.27**	**100**
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**650,000,000**	**635,478,664**	**97.77**	**100**
	xviii	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota**	**90,000,000**	**87,649,848**	**97.39**	**100**
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50,000,000	49,997,078	**99.99**	**100**
	38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	40,000,000	37,652,770	**94.13**	**100**

		kewenangan provinsi.				
	xix	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI**	**30,000,000**	**29,460,020**	**98.20**	**100**
	39	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30,000,000	29,460,020	**98.20**	**100**
	xx	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**530,000,000**	**518,368,796**	**97.81**	**100**
	40	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30,000,000	26,173,350	**87.24**	**100**
	41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500,000,000	492,195,446	**98.44**	**100**
		Jumlah : 41 Sub Kegiatan	**11,569,576,000**	**11,038,708,314**	**95.41**	**100**

C. CAPAIAN KEBERHASILAN

PadaTahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan Penghargaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Anugerah Parahita Ekapraya dan Provinsi Layak Anak (Provila) karna akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebelumnya pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Parahita Ekapraya tingkat madya.

Untuk Penghargaan di Bidang Perlindungan Anak yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Tahun 2023 ada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih Penghargaan KLA, yaiut:

KLA NINDYA : KAB.Muara enim,Musi rawas

KLA MADYA : Kab OKUT, Lubuk linggau, OKUS, dan Lahat

KLaPRATAMA : Pali,Palembang, Banyuasin, Muratara, OKU, PagarAlam, Prabumulih, Empat Lawang dan OK

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih juga bertanggung jawab.

Pencapaian empat sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata persentase capaian sebesar 115,72 %. Persentase capaian yang besar dikarenakan adanya indikator yang pencapaiannya melebihi target atau ada indikator yang capaiannya berbanding terbalik, semakin kecil semakin baik yaitu terkait kekerasan perempuan dan anak. Tercapainya target diantaranya karena meningkatnya koordinasi, kerjasama, sinergi dan ketersediaan data terkait hal tersebut.

Belanja APBD Tahun 2024 dijabarkan menjadi 7 Program, 22 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan capaian realisasi keuangannya sebesar 91,08 % dan realisasi fisik 100 %.

PERMASALAHAN

a. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, seta implementasi pengarustamaan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, sumbangan pendapatan perempuan dan berbagai permasalahan lainnya yang disebabkan oleh banyak faktor seperti nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang belum dapat secara optimal mendukung kemajuan perempuan, belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya upaya perlindungan anak yang diimplementasikan dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sampai Tahun 2023 dari 17 kabupaten/kota sudah 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA dan nilai Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 58,71 menjadi 62,01.
3. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak yang ditandai dengan masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak.
4. Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender dan data anak pada berbagai sektor pembangunan yang diperlukan untuk analisa permasalahan dan dasar perencanaan.

b.Permasalahan Khusus

1. Kelembagaan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sangat bervariasi di Kabupaten/Kota

dan seringnya terjadi rotasi dan mutasi di kabupaten/kota sehingga terkadang menjadi kendala dalam berkoordinasi;

2. Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan (jejaring) serta mekanisme kerja yang belum optimal dalam menciptakan sinergi dalam usaha mencapai kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani permasalahan Perempuan dan Anak belum optimal.
4. Terbatasnya anggaran, revisi anggaran dan pergeseran kode rekening menyesuaikan dengan kebutuhan, keterlambatan jadwal pelaksanaan kegiatan karena kendala teknis, serta adanya keterlambatan penyelesaian SPJ.

2. SOLUSI

a. Solusi Umum

Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor pembangunan terutama dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik sosial dan budaya dengan melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan kesetaraan dan keadilan gender berbasis budaya daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pembinaan, kelompok kerja serta gugus tugas, serta Meningkatkan dan memperluas kesempatan berusaha bagi perempuan dalam pengembangan potensi diri melalui usaha ekonomi produktif dengan terus melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kegiatan Pengembangan Model Desa Prima (APBD) dan mendorong penguatan komitmen dan pelaksanaan dimensi gender pada setiap kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.

2. Mendorong upaya peningkatan pemenuhan hak anak melalui Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) dengan mendorong upaya pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka terwujudnya Provinsi Layak Anak (Provila).
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari semua bentuk kekerasan, perdagangan serta pelanggaran hak dengan memaksimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan mengintegrasikan data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah dan data anak dengan membentuk Forum Data dan membuat aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

b. Solusi Khusus

1. Perubahan nomenklatur pada Tahun 2017 diharapkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PP dan PA Provinsi serta Kabupaten/Kota lebih besar serta koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Perbedaan nomenklatur disiasati dengan mengoptimalkan struktur yang ada dan melaksanakan program kegiatan sesuai skala prioritas daerah masing masing.
2. Memperkuat jejaring kerja serta koordinasi dengan instansi/lembaga kemitraan perempuan dan anak dan mengoptimalkan forum/unit/lembaga yang dibentuk dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak seperti : Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya Provinsi Sumsel.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar tersedianya SDM yang handal dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan dan mengikuti berbagai pelatihan, sosialisasi maupun advokasi.
4. Mengoptimalkan kinerja seluruh Sumber Daya yang ada di Dinas PP dan PA walaupun dengan anggaran yang terbatas atau bahkan tanpa anggaran serta meningkatkan koordinasi internal baik seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholders. Sehingga pada beberapa kegiatan dapat dibantu pendanaannya diluar APBD Provinsi Sumsel, seperti dengan BAZNAS, Kegiatan Lainnya yang bekerjasama dengan *Non Goverment Organisasion* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land4Lives*) dan SPIRE, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah, Gojek Indonesia dan Mitra Lainnya (Pemeriksaan Ibu Hamil bagi Driver dan Keluarga Driver dalam rangka Hari Ibu)

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan masih banyak terdapat kekurangan dan belum memenuhi harapan dari berbagai pihak khususnya pengambil keputusan. Harapan kami semoga kinerja di masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Di akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai sumber data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang agar tercapai kinerja yang lebih baik lagi.

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1254, Palembang.

0711-314004 http://dpppa.sumselprov.go.id/ @dpppasumsel

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30121
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriana, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,	**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,**
Dr. Drs. A. FATONI, M.Si.	**FITRIANA, S.Sos.,M.Si**
	Pembina Utama Muda, (IV/c)
	NIP. 196903281989082002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	1.1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	22,00
		1.2.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	54,5
		1.3.	Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	57,15
		1.4.	Persentase perempuan pada jabatan struktural	35,60
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	8 - 10
		2.2.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	68,00
		2.3	Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	0,75 - 1,50
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	3.1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	58,00
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	4.1	Nilai SAKIP	A (81,00 - 85,00)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	8.975.641.800	APBD
2	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.060.000.000	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	345.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	132.423.000	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	160.000.000	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp	303.000.000	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	650.000.000	APBD

Palembang, Januari 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP 19690328198908200 2

SEKRETARIAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30121
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Surya, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitriana, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
FITRIANA, S.Sos.,M.Si	**INDRA SURYA, SE, MM**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196903281989082002	NIP. 197511132008041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	1.1. Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan	100%
		1.2. Persentase Administrasi Perkantoran yang dibuat dan dikelola	100%
		1.3. Persentase Jasa Penunjang Kantor yang disediakan	100%
		1.4. Persentase Penatausahaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
		1.5. Persentase Dokumen Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100%
		1.6. Persentase Penatausahaan Keuangan yang diselesaikan	100%
		1.7. Persentase Pelaksanaan Rapat/Koordinasi/Pelatihan dan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan	100%

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	15.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.663.285.000	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	35.000.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	35.000.000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	638.770.800	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	395.000.000	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	368.600.000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196903281989082002

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

INDRA SURYA, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751113200804 1001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yedi Prasetyawan, SE

Jabatan : Kepala Sub BagianUmum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indra Surya,SE.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
INDRA SURYA,SE.,MM	**YEDI PRASETYAWAN, SE**
Pembina Tk.I (IV/b)	Penata (III/c)
NIP. 197511132008041001	NIP. 198103262009011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	1.1. Persentase administrasi Barang Milim Daerah (BMD) dan Aset yang diselesaikan	100%
		1.2. Jumlah Sistem Aplikasi Elektronik Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang diinput	1 Aplikasi
		1.3. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
		1.4. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan	24 SOP
		1.5. Persentase terlaksananya administrasi umum/rumah tangga	100%
		1.6. Jumlah Dokumen Administrasi Kantor (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas)	3 Dokumen
		1.7. Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan	100%

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.669.585.891	APBD
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	735.700.000	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	35.000.000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	15.000.000	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	50.000.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	275.000.000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	30.000.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	90.000.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	275.000.000	APBD
10.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	20.000.000	APBD
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	73.600.000	APBD

Palembang, 2024

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

INDRA SURYA, S.E.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197511132008041001

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

YEDI PRASETYAWAN, SE
Penata (III/c)
NIP. 198103262009011012

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yulia Rhamadini, S.Kom.,M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indra Surya,SE.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

INDRA SURYA,SE.,MM
PembinaTk.I (IV/b)
NIP. 197511132008041001

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

YULIA RHAMADINI,S.Kom.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197907312005012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	1.1. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Keuangan (Anggaran Kas, SPD (Induk dan Perubahan))	4 Dokumen
		1.2. Jumlah Sistem Aplikasi Elektronik Keuangan (SIPD RI, e Sumsel)	2 Aplikasi
		1.3. Persentase SPJ yang diverifikasi dan disimpan	100%
		1.4. Peersentase Dokumen Keuangan yang diselesaikan (SPP UP/TUP?GUP/LS BL dan BTL serta SPM)	100%
		1.5. Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang diselesaikan (SPJ GU, SPJ JB, BKU, Rekon, LS Kas, LS Gaji Honor, LS TPP)	12 Dokumen
		1.6. Jumlah Laporan Keuangan yang dibuat	1 Laporan
		1.7. Jumlah Kegiatan/Rapat/Koordinasi yang dilaksanakan atas perintah pimpinan	20 Kali

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	208.000.000	APBD
2.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	50.000.000	APBD
3.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	20.000.000	APBD

Palembang, 2024

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

INDRA SURYA, S.E.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197511132008041001

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

YULIA RHAMADINI,S.Kom.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197907312005012010

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Setriyana Amelia, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indra Surya,SE.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

INDRA SURYA,SE.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197511132008041001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN,

SETRIYANA AMELIA, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP.198612152011012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 Dokumen
		1.2. Jumlah Sistem Aplikasi Elektronik Perencanaan dan Penganggaran yang di input/entry	3 Aplikasi
		1.3. Jumlah Kebijakan Hukum yang dipelajari tentang Perencanaan dan Penganggaran	1 Kebijakan
		1.4. Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen
		1.5. Jumlah Dokumen Administrasi PEP yang dibuat dan dikelola	3 Dokumen
		1.6. Jumlah Dokumen Bahan Rapat/Laporan yang dibuat	6 Dokumen
		1.7. Jumlah Dokumen Monev yang disusun Perangkat Daerah	17 Dokumen
		1.8. Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun Perangkat Daerah	4 Dokumen
		1.9. Jumlah Kebijakan Hukum yang dipelajri tentang Pelaporan	1 Kebijakan
		1.10. Jumlah Sistem Aplikasi Elektronik Monev dan Pelaporan yang diinput	2 Aplikasi
		1.11. Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan Rakor PPPA Provinsi	2 Laporan
		1.12. Jumlah Rapat/Koordinasi/Pelatihan dan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan	15 kali

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	5.000.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	10.000.000	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp	35.000.000	APBD
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	160.000.000	APBD
5.	Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	40.000.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	353.770.800	APBD

Palembang, 2024

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

INDRA SURYA, S.E.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751[illegible]32006041001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN,

SETRIYANA AMELIA, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198612152011012005

BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERBERDAYAAN PEREMPUAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126
E-mail : bpppasumsel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinthan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang PUG dan PP

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	FITRIANA S.Sos., M.Si
Jabatan	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KEPALA BIDANG PUG DAN PP
FITRIANA S.Sos., M.Si	IHWAN MULYAWAN, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina / IV. a
NIP. 196903281989082002	NIP. 197512112005021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	22.00%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54, 54%
		Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pda organisasi kemasyarakatan	1 Jenis
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan PP daN Pusat Pembelajaran Perempuan yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga
		Jumlah Media KIE Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Media

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp	200,000,000	APBD
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial , dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Rp	100,000,000	APBD
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	760,000,000	APBD
4	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp	150,000,000	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

FITRIANA S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803281989082002

KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Ihwan Mulyawan, S.T.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197512112005021003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126
E-mail : bpppasumsel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinthan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Samsah, S.Sos
Jabatan	:	Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang PUG dan PP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KEPALA BIDANG PUG DAN PP	PIHAK PERTAMA KASI PEMBINAAN KUALITAS KELUARGA
IHWAN MULYAWAN, ST., M.Si	Samsah, S.Sos
Pembina / IV.a	Penata TK I / III.d
NIP. 197512112005021003	NIP. 196608021989031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMBINAAN KUALITAS KELUARGA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	45 Lembaga

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	630,000,000	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197512112005021003

KASI PEMBINAAN KUALITAS KELUARGA

Samsah, S.Sos
Penata TK I (III.d)
NIP. 196808021989031005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126
E-mail : bpppasumsel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinthan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Titin Sumarni, M.Pd
Jabatan	:	Kasi Pemberdayaan Ekonomi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang PUG dan PP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KEPALA BIDANG PUG DAN PP	PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN EKONOMI
IHWAN MULYAWAN, ST., M.Si Pembina / IV.a NIP. 197512112005021003	Titin Sumarni, M.Pd Pembina / IV.a NIP. 197208252006042004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi kepada organisasi masyarakat di Kab/ Kota	10 Organisasi
		Jumlah Dokumen KIE KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Rp	200,000,000	APBD
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp	100,000,000	APBD
3	Pelaksanaan KIE dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp	100,000,000	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197512112005021003

KASI PEMBERDAYAAN EKONOMI

Titin Sumarni, M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 197206252006042004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126
E-mail : bpppasumsel@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinthan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Shinta Kencanasari, SP., M.Si
Jabatan	:	Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik, Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Ihwan Mulyawan, ST., M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang PUG dan PP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PUG DAN PP

IHWAN MULYAWAN, ST., M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 197512112005021003

PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM

Shinta Kencanasari, SP., M.Si
Penata TK I / III.d
NIP. 198610112011012018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan keluarga	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen
		Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	70,000,000	APBD
2	Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	60,000,000	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

Ihwan Meiyawan, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197512112005021003

KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM

Shinta Kencanasari, SP., M.Si
Penata TK I (III.d)
NIP. 198610112011012018

BIDANG
TUMBUH KEMBANG ANAK
(TKA)

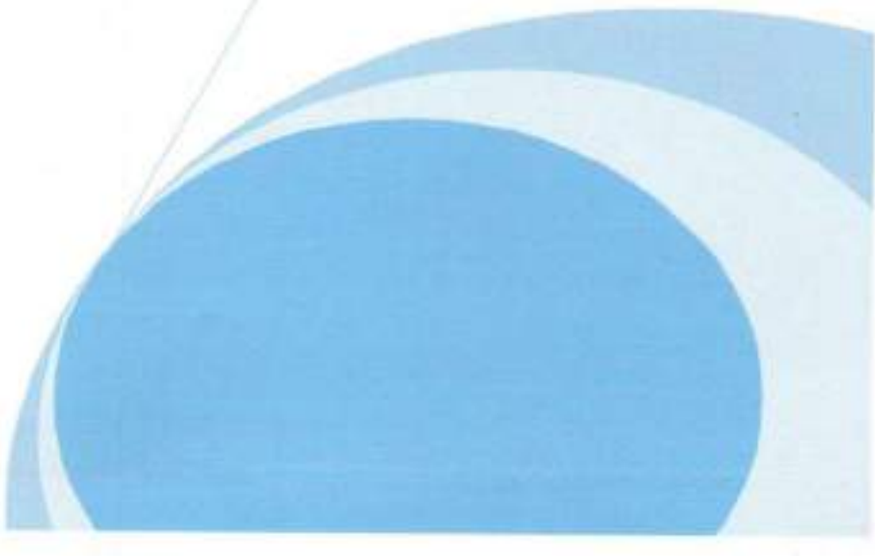

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunedi, SH, MAP
Jabatan : Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitriana, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMSEL,

Fitriana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196903281989082002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG TUMBUH
KEMBANG ANAK,

Yunedi, SH, MAP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197011201989081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase kabupaten/kota yang nilai evaluasi KLA mengalami peningkatan	100%
		Persentase kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak	100%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100%
		Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif bagi keluarga	100%
		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	31 organisasi
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA kewenangan provinsi	1 dokumen
		Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PHA bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen
		Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota	1 layanan

NO.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
1.	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenagan Provinsi	Rp	135,000,000	APBD
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	168,000,000	APBD
3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	32,423,000	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

FITRIANA, S.Sos, Msi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603281989082002

KABID TUMBUH KEMBANG ANAK,

YUNEDI, S.H, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197011201989081001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Maharani, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kasi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yunedi, SH, MAP
Jabatan : Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID TUMBUH KEMBANG ANAK,	PIHAK PERTAMA KASI PENGASUHAN, PENDIDIKAN DAN BUDAYA,
YUNEDI, SH, MAP Pembina Tk. I / IV.b NIP. 197011201989081001	**FITRI MAHARANI,S.Sos, M.Si** Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 198506192008042002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENGASUHAN, PENDIDIKAN DAN BUDAYA BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan dan bahan bacaan yang dipelajari/review/dibuat terkait pelaksanaan kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif serta kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	6 dokumen
		Jumlah data/laporan terkait kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif serta kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang dibuat dan kelola	2 dokumen
		Jumlah dokumen rencana kegiatan seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi yang dibuat dan kelola seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya	1 dokumen
		Jumlah kegiatan/rapat/koordinasi yang diikuti terkait tusi	24 Kali
		Jumlah dokumen administrasi/laporan yang disusun diluar tusi (TAMBAHAN)	4 dokumen
		Jumlah kegiatan/rapat/koordinasi yang diikuti diluar tusi atau mewakili dinas (TAMBAHAN)	18 Kali

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp	50.000.000	

Palembang, Januari 2024

KABID TUMBUH KEMBANG ANAK,

YUNEDI, SH, M.AP
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197011201989081001

KASI PENGASUHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA,

FITRI MAHARANI, S.Sos, M.SI
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 198506192008042002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Kartika Silva Riany, S.E
Jabatan : Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yunedi, SH, MAP
Jabatan : Kabid Tumbuh Kembang Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID TUMBUH KEMBANG ANAK,	PIHAK PERTAMA KASI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI,
YUNEDI, SH, MAP Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 197011201989081001	**EKA KARTIKA SILVA RIANY, S.E** Penata Tingkat I / III.d NIP. 197302202007012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga *Penyedia Layanan Peningkatan* Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		Jumlah rencana operasional program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar dapat terpenuhinya hak-hak anak	10 laporan
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi sesuai *ketentuan perundangan yang berlaku* agar dapat terpenuhinya hak-hak anak	10 laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	168,000,000	APBD
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		-	APBD
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		-	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA BIDANG
TUMBUH KEMBANG ANAK,

YUNEDI, S.H, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197011201989081001

KASI HAK SIPIL,
INFORMASI DAN PARTISIPASI,

EKA KARTIKA SILVA RIANY, S.E
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197302202007012003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel1@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toni Fauzan, S.E, M.Si
Jabatan : Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yunedi, SH, MAP
Jabatan : Kabid Tumbuh Kembang Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID TUMBUH KEMBANG ANAK,	PIHAK PERTAMA KASI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN,
YUNEDI, SH, MAP Pembina Tingkat I / IV.b NIP. 197011201989081001	**TONI FAUZAN, S.E, M.Si** Pembina / IV.a NIP. 198412192008041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	31 Organisasi
		Jumlah frekuensi pembagian tugas kepada bawahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan	10 kali
		Jumlah laporan rencana operasional program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar dapat terpenuhinya hak-hak anak	10 laporan
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku agar dapat terpenuhinya hak-hak anak	1 dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp	65,000,000	APBD
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		-	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		-	APBD

Palembang, Januari 2024

KEPALA BIDANG
TUMBUH KEMBANG ANAK,

YUNEDI, S.H, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197011201989061001

KASI KESEHATAN
DAN KESEJAHTERAAN,

TONI FAUZAN, S.E, M.SI
Pembina (IV.a)
NIP. 196412192008041001

BIDANG
DATA DAN INFORMASI
GENDER DAN ANAK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlela, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitriana, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK,
Fitriana, S.Sos, M.Si	**Nurlela, SH, M.Si**
Pembina Utama Muda / IV.c	Pembina / IV.a
NIP. 196903281989082002	NIP. 197212231992032005

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	% Kabupaten/Kota yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilah baik manual atau aplikasi	100,00%
		Persentase keterisian data terpilah dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	53,25%
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Persentase kabupaten/kota yang menginput dan memanfaatkan data kekerasan perempuan dan anak pada SIMFONI	100%
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase kabupaten/kota yang memiliki dan memanfaatkan data anak	100%

NO.	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp	110.000.000	APBD
2.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp	30.000.000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Fitriana, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196903281989082002

KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

Nuriela. SH, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 197212231992032005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email *bpppasumsel@yahoo.co.id / dp3asumsel@yahoo.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Haris Ritanza, S.H., M.Si
Jabatan : Kasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurlela, SH, M.Si
Jabatan : Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK,	PIHAK PERTAMA KASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA GENDER,
Nurlela, SH, M.Si Pembina / IV.a NIP. 197212231992032005	**HARIS RITANZA, SH,M.Si** Pembina NIP. 196605241988021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA GENDER
BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah jenis data terpilah gender yang tersedia dan dimanfaatkan	140 jenis data
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	1 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp	30.000.000	APBD
2.	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp	130.000.000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI,

Nurela, SH, M.Si
Pembina / IV.a
NIP.197212231992032005

KASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA GENDER,

H. HARIS RITANZA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 196605241988021002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Efendi, SH
Jabatan : Kasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurlela, SH, M.Si
Jabatan : Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK,	PIHAK PERTAMA, KASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN PENGELOLAAN DATA ANAK,
Nurlela, SH, M.Si Pembina / IV.a NIP. 197212231992032005	**TRI EFENDI, SH** Penata Tk.I NIP. 198202152010011021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA ANAK
BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah jenis data anak yang tersedia	138 jenis
		Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	1 dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp 130.000.000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI,

Nurela, SH, M.Si
Pembina / IV.a
NIP.197212231992032005

an. KASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA ANAK,

Tri Efendi, SH
Penata Tk. I
NIP. 198202152010011021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Januarida, SE, M.Si
Jabatan : Kasi Informasi Data Gender dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurlela, SH, M.Si
Jabatan : Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA KABID DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK,	PIHAK PERTAMA, KASI INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK,
Nurlela, SH, M.Si Pembina / IV.a NIP. 197212231992032005	**Januarida, SE, M.Si** Pembina / IV.a NIP. 197601011998032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK
BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen
		Jumlah laporan kekerasan perempuan dan anak pada e-Simfoni	1 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1.	Penyajiandan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Rp	30.000.000	APBD
2.	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp	130.000.000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI,

Nurela, SH, M.Si
Pembina / IV.a
NIP.197212231992032005

KASI INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK,

Januarida, SE, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 197601011998032004

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3aksumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musharmina, S.AP
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fitriana, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,
FITRIANA, S.Sos., M.Si	**MUSHARMINA, S.AP**
Pembina Utama Muda / IV.c	Pembina TK.I / IV.b
NIP. 196903281989082002	NIP. 197306161992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	50.00%
		Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	60.00%

NO	KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	30,000,000	APBD
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	500,000,000	APBD
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	135,000,000	APBD
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp	90,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196903281989082002

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,

MUSHARMINA, S.AP
Pembina TK.I / IV.b
NIP.197306161992032001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bariyanti Arthini, S.E., M.Si
Jabatan : Kasi Perlindungan Khusus Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Musharmina, S.AP
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,	KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK,
MUSHARMINA, S.AP	**BARIYANTI ARTHINI, S.E.,M.Si**
Pembina TK.I / IV.b	Pembina / IV.a
NIP. 197306161992032001	NIP. 198112062006042016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Jumlah kab/kota Peningkatan Kapasitas aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	5 Kab/Kota
		Jumlah kab/kota Peningkatan Kapasitas Relawan SAPA Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	5 Kab/Kota
		Persentase administrasi gaji Komisioner dan POKJA KPAD Sumsel	100%
		Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Rentan Kekerasan (ARK)	50 Orang
		Jumlah peserta Pelatihan bagi Orang Tua / Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	50 Orang
		Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Sekolah	120 Orang
		Jumlah dokumen pelaporan terkait perlindungan khusus anak	1 dokumen

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	30,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	500,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,

MUSHARMINA, S.AP
Pembina TK.I / IV.b
NIP.197306161992032001

KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK,

BARIYANTI ARTHINI, S.E.,M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 198112062006042016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kasi Perlindungan Hak Perempuan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Musharmina, S.AP
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,	KASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN,
MUSHARMINA, S.AP	**SAID, S.Sos., M.Si**
Pembina TK.I / IV.b	Penata Tk. I / III.d
NIP. 197306161992032001	NIP. 198003212009011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan	Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Pusat Informasi Komunikasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD)	5 kab/kota
		Jumlah kab/kota yang mengikuti Pelatihan SIMFONI berbasis Manajemen Kasus	17 kab/kota
		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialsasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	70 Orang
		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialsasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Wanita Tuna Sosial (Wanita Rawan Ekonomi)	50 orang
		Jumlah dokumen pelaporan terkait perlindungan hak perempuan	1 dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	135,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,

MUSHARMINA, S.AP
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.197306161992032001

KASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN,

SAID, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I / III.d
NIP. 198003212009011006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
Email : dp3asumsel@gmail.com, Website : dpppa.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Riatni
Jabatan : Kasi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Musharmina, S.AP
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,	KASI PEMBINAAN LEMBAGA LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK,
MUSHARMINA, S.AP	**Dra. Hj. RIATNI**
Pembina TK.I / IV.b	Penata Tk. I / III.d
NIP. 197306161992032001	NIP. 196606061986032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Jumlah UPTD PPA dan UPPA Kab/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	17 Kab/Kota
		Jumlah SDM lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang terlatih	34 Orang
		Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahtraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	7 Kab/Kota

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	90,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,

MUSHARMINA, S.AP
Pembina TK. I / IV.b
NIP.197306161992032001

KASI PEMBINAAN LEMBAGA LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK,

Dra. Hj. RIATNI
Penata Tk. I / III.d
NIP. 196606061986032006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alkala Zamora S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD PPA Provinsi Sumsel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitriana, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL,
FITRIANA,S.Sos.,M.Si	**ALKALA ZAMORA S.E.,M.M.**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 196903281989082002	NIP. 197202212002121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMSEL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase rencana program kerja pelayanan sumber dana APBD	100%
		Persentase koordinasi kasus yang terlaksana	100%
		Persentase kasus yang terlayani	100%
		Persentase surat masuk/keluar yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase pembinaan yang dilakukan terhadap ASN	100%
		Persentase evaluasi yang dilakukan terhadap ASN	100%

No.	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	120,000,000	APBD
2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	90,000,000	APBD
3	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkt Daerah Provinsi	Rp	30,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

FITRIANA,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903281989082002

KEPALA UPTD PPA
PROVINSI SUMSEL,

ALKALA ZAMORA, S.E.,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 197202212002121006

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Reza Alpinsawi,S.Sos.,MAP
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPTD PPA Provinsi Sumsel

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Alkala Zamora S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD PPA Provinsi Sumsel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,
ALKALA ZAMORA S.E.,M.M.	**M.REZA ALPINSAWI,S.SOS.,MAP**
Pembina (IV/a)	Penata (III/c)
NIP. 197202212002121006	NIP. 197110102007011049

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase rencana program kerja pelayanan sumber dana APBD	100%
		Jumlah dokumen laporan keuangan	4 Laporan
		Jumlah dokumen adiminstrasi UPTD PPA	60 dokumen
		Jumlah dokumen kasus UPTD PPA	36 kasus

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	Penyedian Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan	Rp	40,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000	APBD
3	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Provinsi	Rp	40,000,000	APBD
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	50,000,000	APBD
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Rp	30,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

ALKALA ZAMORA, S.E,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 197202212002121006

KASUBBAG TATA USAHA
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

M.REZA ALPINSAWI, S.Sos.,MAP
Penata (III/c)
NIP.197110102007011049

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sumarto
Jabatan : Pengelola surat Subbag Tata Usaha UPTD PPA Provinsi Sumsel

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M.Reza Alpinsawi, S.Sos.,MAP
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPTD PPA Provinsi Sumsel

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TATA USAHA	STAF SUBBAG TATA USAHA
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,	UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,
M.Reza Alpinsawi, S.Sos.,MAP	**SUMARTO**
Penata (III/c)	Pengatur Muda (II/c)
NIP. 197110102007011049	NIP. 198305272010011028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STAF KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah dokumen yang diterima dan dicatat dalam buku agenda surat telah dilaksanakan sesuai prosedur	48 Dokumen
		Jumlah pengarsipan data/dokumen telah baik sesuai prosedur	48 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	Penyedian Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000	APBD
3	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Provinsi	Rp	40,000,000	APBD
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	50,000,000	APBD
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	30,000,000	APBD

Palembang, 2024

KASUBBAG TATA USAHA
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

M.REZA ALPINSAWI,S.Sos.,MAP
Penata (III/c)
NIP. 197110102007011049

STAF SUBBAG TATA USAHA
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

SUMARTO
Pengatur (II/c)
NIP.198305272010011028

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirudin, SH.,M.Si
Jabatan : Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Provinsi Sumsel

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Alkala Zamora S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD PPA Provinsi Sumsel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KASI TINDAK LANJUT KASUS UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,
ALKALA ZAMORA S.E.,M.M.	**AMIRUDIN SH.,M.Si.**
Pembina (IV/a)	Pembina (IV/a)
NIP. 197202212002121006	NIP. 197112092003121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI TINDAK LANJUT KASUS UPTD PPA PROVINSI SUMSEL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah mediasi yang dilakukan	10 Kasus
		Jumlah dokumen mediasi yang dilaksanakan	10 Dokumen
		Jumlah pendampingan korban pemulihan yang terlayani	10 Kasus
		Jumlah pendampingan hukum yang terlayani	15 kasus

No.	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Rp	40,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000	APBD
3	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Provinsi	Rp	40,000,000	APBD
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	50,000,000	APBD
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	30,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

ALKALA ZAMORA, S.E,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 197202212002121006

KASI TINDAK LANJUT KASUS
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

AMIRUDIN, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.197112092003121004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tutwuri Handayani S.E.,M.Si.
Jabatan : Kasi Penerima Pengaduan UPTD PPA Provinsi Sumsel

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Alkala Zamora S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD PPA Provinsi Sumsel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palembang, 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMSEL,	KASI PENERIMA PENGADUAN UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,
ALKALA ZAMORA S.E.,M.M.	**TUTWURI HANDAYANI S.E.,M.Si.**
Pembina (IV/a)	Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197202212002121006	NIP. 197901102008012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENERIMA PENGADUAN UPTD PPA PROVINSI SUMSEL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelayanan penjangkauan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan	100%
		Jumlah dokumen lapcran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didokumetasikan	50 Kasus
		Persentase pelaksanaan kegiatan penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	100%
		Jumlah dokumen laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didokumetasikan	50 Kasus
		Persentase pelayanan penjangkauan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan	100%
		Jumlah dokumen laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50 dokumen
2		jumlah dokumen layanan rujukan penampungan sementara	10 Dokumen

No.	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyedian Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000	APBD
3	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Provinsi	Rp	40,000,000	APBD
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Rp	50,000,000	APBD
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	30,000,000	APBD

Palembang, 2024

KEPALA UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

ALKALA ZAMORA, S.E.,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 197202212002121006

KASI PENERIMA PENGADUAN
UPTD PPA PROVINSI SUMSEL,

TUTWURI HANDAYANI. SE.,M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP.197901102008012004

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

OUTCOME
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indek Perlindungan Anak (IPA)

MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
INDIKATOR : % ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD,
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

BAPPEDA, INSPEKTORAT

BPKAD, SPARO SELURUH OPD AKADEMISI

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PUG DAERAH DAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN, INDIKATOR : % KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT APE

PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI

KEGIATAN : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

IK : Presentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

2.Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA SINERGI DENGAN LEMBAGA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KEGIATAN : Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

IK: jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA KOMITMEN DAERAH MELAKSANAKAN PUG

KEGIATAN : Pelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

IK : Persentase kab/kota yang Melaksanakan PUG

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPILAH, INDIKATOR % KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI DAN MEMANFAATKAN DATA TERPILAH

Diodukcapil, Kominfo, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, seluruh OPD

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

MENINGKATNYA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK

KEGIATAN : Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

IK : Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
INDIKATOR : INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)
RASIO KEKERASAN THD PEREMPUAN TERMASUK TPPO PER 100.000 PR
RASIO KEKERASAN TERHADAP ANAK PER 10.000 ANAK

MENINGKATNYA IKEPUASAN PELAYANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN :INDIKATOR : NILAI IKM UPTD PPA

DINKES POLDA KEJATI PENGADILAN

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

MENINGKATNYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KEGIATAN : Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA PEMENUHAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

KEGIATAN : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingka Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Linta Daerah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA SINERGI DENGAN LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KEGIATAN : Kegiatan Pengguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasa Kewenangan Provinsi

2. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi

3.Pengutaan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

MENINGKATNYA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK

KEGIATAN : Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

IK : Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

MENINGKATNYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN ANAK , INDIKATOR : % KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI DAN TERSELESAIKAN

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

MENINGKATNYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

KEGIATAN : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

IK : Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA PEMENUHAN LAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN

KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

IK :Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA SINERGI DENGAN LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang bersinergi

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Dinkes, Disdik, PU,Dishub, Kemenag, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan, Dmsos, Dispora, Dinas Pariwisata

MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK ANAK
INDIKATOR : PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENUJU KLA

MENINGKATNYA SINERGI PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK, INDIKATOR : % KABUPATEN/KOTA YANG NILAI EVALUASI KLA MENGALAMI PENINGKATAN

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

MENINGKATNYA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DAN PENGASUHAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

KEGIATAN : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, IK : % Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi/ IK : Persentase Kab/ Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

3.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak dan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

4.Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah/Kabupaten/Kota

MENINGKATNYA KUALITAS KETAHANAN KELUARGA, INDIKATOR : % KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN KUALITAS KETAHANAN KELUARGA

DUKCAPIL, DINKES, KEMENAG, DISNAKER, BKSBN, DISDIK

PROGRAM KUALITAS KELUARGA

MENINGKATNYA SINERGI KELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK

KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, IK : Jumlah kegiatan KIE bagi keluarga

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

KETERSEDIAN LEMBAGA LAYANAN BAGI KELUARGA

KEGIATAN :Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi / jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK

KEGIATAN : Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah, Kabupaten/Kota, IK : Jumlah keluarga yang diberikanlayanan komprehensif

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

SARPEDA, DINAS KOPERASI &UKM PERINDAG, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MEWUJUDKAN TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL
IK : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
INDIKATOR : NILAI SAKIP

MENINGKATNYA SUMBERDAYA MANUSIA, TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN TATA USAHA PERKANTORAN

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bendaharawan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional ata Lapangan

2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan aset tak berwujud

4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KETERSEDIAAN SERTA PENERAPAN SOP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7.Fasilitasi Kunjungan Tamu

8.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Penatausahaan Arsip Dinamis

MENINGKATNYA KETERSEDIAN JASA PENUNJANG PERKANTORAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

MENINGKATNYA PERENCANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN KINERJA

MENINGKATNYA KUALITAS PROSES DAN DOKUMEN PERENCANAAN, INSTANSI PEMERINTAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD

MENINGKATNYA MONTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEUANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sub Kegiatan :

1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.Pelaksanaa n Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/Seme steran SKPD

MENINGKATNYA PELAPORAN KEUANGAN

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Target			Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Rencana Anggaran			Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Rencana Anggaran			Sub kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Kinerja			Rencana Anggaran			Unit Kerja PD Penanggung Jawab
		2024	2025	2026			2024	2025	2026			2024	2025	2026	2024	2025	2026			2024	2025	2026	2024	2025	2026			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,00	93,30	93,50	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase ARG pada BL APBD	22,00	24,00	27,00	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat APE	82,35	94,11	100,00	2.170.000	2.350.000	3.500.000	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	70,00	73,00	73,38	350.000	350.000	400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenTerlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	Bidang PUG PP
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,00	75,50	76,00		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,5	55,00	56,00																	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1	1	1	200.000	200.000	250.000	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,00	64,00	66,00		Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial	57,15	57,65	58																	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	66	70	70	150.000	150.000	150.000	
						Persentase perempuan pada jabatan struktural	35,8	35,9	36																	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		0	0	-	-	-	
																		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	500	250	250	600.000	700.000	1.800.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1	1	1	200.000	100.000	300.000	Bidang PUG PP
																								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	10	10	10	400.000	600.000	1.500.000	
																		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	47	48	50	1.220.000	1.300.000	1.300.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	45	45	45	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
																								Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	100	100	100.000	100.000	100.000	Bidang PUG PP
																								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1	1	1	100.000	150.000	150.000	
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Dan Memanfaatkan Data Terpilah	100	100	100	350.000	350.000	400.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	58,82	76,47	100	350.000	350.000	400.000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2	2	2	200.000	200.000	250.000	Bidang Data
																								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2	2	2	150.000	150.000	150.000	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	8 - 10	8 - 10	8 - 10	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	85-95	85-95	85-95	450.500	750.000	900.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	82,35	88,24	100	45.500	100.000	100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1	1	1	45.500	50.000	50.000	Bidang PPA
																								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		30	30		50.000	50.000	
																		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	120.000	200.000	250.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30	50	50	40.000	100.000	150.000	UPTD PPA
																								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25	25	30	80.000	100.000	100.000	

																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	25	27	30	285.000	450.000	600.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		1	1		50.000	50.000	Bidang PPA
																							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50	68	75	135.000	150.000	200.000													
																							Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	1	50	150		50.000	150.000													
																							Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	150.000	200.000	200.000													
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	58,00	59,00	60,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan Terselesaikan	50	60	70	1.270.000	1.400.000	2.015.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	82,35	88,24	100	100.000	100.000	100.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	50	50	50.000	50.000	50.000	Bidang PPA
						Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5																Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	1	1	50.000	50.000	50.000													
																	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	220.000	300.000	500.000	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	40	40	40	30.000	50.000	100.000													
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan Perindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	25	30	30	140.000	200.000	200.000													
																							Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1	1	1	50.000	50.000	100.000													UPTD PPA
																							Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						100.000													
																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	25	27	30	950.000	1.000.000	1.415.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2	2	2	950.000	1.000.000	65.000													
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi						1.300.000													
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						50.000													
					Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	68,00	69,00	70,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Nilai Evaluasi Kla Mengalami Peningkatan	76,47	88,23	100	550.000	650.000	1.350.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Ana	100	100	100	300.000	300.000	400.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	31	31	31	200.000	200.000	250.000													Bidang TKA
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	1	1	100.000	100.000	150.000													
																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	100	100	250.000	350.000	950.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			100			250.000													
																							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			1			250.000													
																							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Kewenangan Provinsi	1	1	1	250.000	250.000	250.000													Bidang TKA

																									Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	1		100.000	200.000		
										PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga	58,82	70,58	100	332.423	350.000	750.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE terkait kualitas keluarga	2	2	3	200.000	200.000	450.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	1	1	200.000	200.000	250.000 200.000	Bidang PUG PP
																	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	10	10	10	100.000	100.000	200.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	100	100	100	100.000	100.000	200.000	Bidang PUG PP
																	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yang memberikan layanan komprehensif bagi keluarga	100	100	100	32.423	50.000	100.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	32.423	50.000	100.000	Bidang PUG PP
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	A	A	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	11.003.520	11.369.403	13.349.668	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100	100	100	25.000	30.000	40.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 4	2 4	2 4	10.000 15.000	15.000 15.000	20.000 20.000	Sekretariat
																	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	100	100	100	8.944.520	8.963.580	9.228.865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45 29 32 2	50 30 32 2	50 30 32 2	7.890.620 783.900 220.000 50.000	7.893.580 800.000 220.000 50.000	8.078.865 850.000 250.000 50.000	Sekretariat
																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100	100	100	184.000	205.000	500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 5 5	 1 10 50 6	1 10 50 6	64.000 80.000 40.000	 50.000 80.000 25.000 50.000	150.000 50.000 200.000 50.000 50.000	Sekretariat
																									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 1	12 1	15 1	15.000 150.000	30.000 100.000	30.000 200.000	

z

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu 2025
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**8,979,903,000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**10,000,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan**	**Persen**	**100**	**7,421,302,200**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	6,512,082,200
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	29	675,700,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	32	183,520,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	50,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**35,000,000**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	35,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**35,000,000**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	35,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**700,000,800**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	160,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	415,000,800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**410,000,000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	275,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	105,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD**	**Persen**	**100**	**368,600,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	275,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan	5	20,000,000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Website	1	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1	73,600,000
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase ARG pada BL APBD**	**Persen**	**22**	**999,250,000**
	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	**Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG**	**Persen**	**70**	**200,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Tingkat Provinsi	Laporan	1	200,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi**	**Orang**	**200**	**80,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Laporan	10	80,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi**	**Lembaga**	**47**	**719,250,000**

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat provinsi	Lembaga	45	630,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	Orang	100	70,000,000
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yang terbentuk di provinsi	Unit	1	19,250,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat PPA**	**Persen**	**80**	**315,000,000**
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**100**	**120,000,000**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	30 Orang	40,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25 Layanan	25 Layanan	80,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25**	**25**	**195,000,000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	135,000,000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		**58.82%**	**100**	**182,423,000**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlak kegiatan KIE kualitas keluarga**	**2**	**2**	**150,000,000**

	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif**	**50**	**50**	**32,423,000**
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	32,423,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		**20%**	**100**	**140,000,000**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak**	**58.82%**	**100**	**140,000,000**
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dkumen	2 Dkumen	30,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**100%**	**100**	**303,000,000**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak**	**100%**	**100**	**135,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	85,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.**	**80**	**80**	**168,000,000**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	168,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**50%**	**100**	**650,000,000**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak**	**82.35%**	**100**	**90,000,000**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang	40,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**100**	**30,000,000**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	30,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25**	**25**	**530,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	25 Dokumen	25 Dokumen	0
	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang	500,000,000
			Total		**11,569,576,000**

MONEV RENCANA AKSI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

TRIWULAN IV

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET PER TW				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN	TARGET				PAGU	Realiasasi TW IV		
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		Kinerja	Rp	%
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	22.00	-	-	-	22.00	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	22,00%	-	-	-	22.00	1,060,000,000	42.08	962,087,751	90.76
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54.50	-	-	-	54.00	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	70.00%	-	50	70	100%	200,000,000	100	185,914,090	92.96
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Laporan	-	-	1	1	200,000,000	1 Laporan	185,914,090	92.96
		Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	57.15	-	-	-	57.15	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	200 Orang	-	100	100	200	100,000,000	200	78,129,340	78.13
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/media tingkat provinsi yang	10 Lembaga	-	5	5	10	100,000,000	10 Lembaga	78,129,340	78.13
		Persentase perempuan pada jabatan struktural	35.80	-	-	-	35.80	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	47 Lembaga	-	47	47	47	760,000,000	47	698,044,321	91.85
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat	45 Lembaga	-	45	45	45	630,000,000	46 Lembaga	611,642,986	97.09
								Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	-	50	100	100	70,000,000	100 Orang	67,211,022	96.02
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yang terbentuk di provinsi	1 Unit	-	-	-	1	60,000,000	1 unit	19,190,313	31.98
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	22.00	-	-	-	20.00	140,000,000	42.08	130,404,460	93.15
								Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	Persentase Keterisian Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	60.65	-	-	-	60.65	140,000,000		130,404,460	93.15
								Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	-	-	1	1	110,000,000	1 Dokumen	104,224,460	94.75
								Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	2 Dokumen	-	-	1	1	30,000,000	1 Dokumen	26,180,000	87.27

2	**Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak**	**Rasio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Per 100.000 perempuan)**	**8 - 10**	**-**	**-**	**-**	**8 - 10**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Per 100.000 perempuan)**	**8 - 10**	-	-	-	**8 - 10**	**345,000,000**	6.15	**284,671,350**	82.51
		Rasio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 anak)	**7,5 - 1,5**	-	-	-	**7,5 - 1,5**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**120,000,000**	100	**93,281,102**	77.73
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	2	10	20	30	40,000,000	3 Orang	35,149,192	87.87
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20 Kasus	2	7	15	20	80,000,000	3 Kasus	58,131,910	72.66
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	**68.00**	**-**	**-**	**-**	**68.00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25 Lembaga**	-	-	25	25	**225,000,000**	25	**191,390,248**	85.06
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	18 Orang	**-**	**-**	18	18	135,000,000	50 Orang	133,062,248	98.56
								Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**-**	**-**	1	1	90,000,000	1 Dokumen	58,328,000	64.81
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Rasio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 anak)**	**7,5 - 1,5**	**-**	**-**	**-**	**7,5 - 1,5**	**650,000,000**	1.32	**635,478,664**	97.77
								Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak**	**82.35%**	**82.35%**	**82.35%**	**82.35%**	**82.35%**	**90,000,000**	82.35	**87,649,848**	97.39
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan	1 Dokumen	**-**	**-**	1	1	50,000,000	1 Dokumen	49,997,078	99.99

								Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang		1	1	1	40,000,000	17 Organisasi	37,652,770	94.13
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**30,000,000**	100	**29,460,020**	98.20
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	10	25	40	40	30,000,000	24 anak	29,460,020	98.20
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25**	**5**	**10**	**15**	**25**	**530,000,000**	25	**518,368,796**	97.81
								Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1 Dokumen	-	1	1	1	30,000,000	1 Dokumen	26,173,350	87.24
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	400 Orang	-	3	3	3	500,000,000	40 Orang	492,195,446	98.44
3	**Meningkatnya Pemenuhan Hak anak**	**Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**303,000,000**	100	**298,785,626**	98.61
								Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak**	**17 Organisasi**	**-**	-	**17**	**17**	**135,000,000**		**133,694,164**	99.03
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	17 Lembaga	-	-	17	17	50,000,000	17 Lembaga	49,806,005	99.61
								Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1 Dokumen	-	-	1	1	85,000,000	1 Dokumen	83,888,159	98.69
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.**	**80 Lembaga**	-	-	80	80	**168,000,000**		**165,091,462**	98.27

								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen	-	-	1	1	168,000,000	80	165,091,462	98.27
								PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA**	**100%**	-	-	-	**100%**	**182,423,000**	100	**180,040,447**	98.69
								Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlak kegiatan KIE kualitas keluarga**	**2 Media**	-	-	-	2	**150,000,000**		**148,533,522**	99.02
								Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	-	-	-	1	150,000,000	1 Dokumen	148,533,522	99.02
								Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif**	**5 Kab/Kota**	-	-	5	5	**32,423,000**	5	**31,506,925**	97.17
								Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	-	-	**-**	**1**	32,423,000	1 Layanan	31,506,925	97.17
4	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi**	**Nilai SAKIP**	**81.00**	**-**	**-**	**-**	**81.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**9,150,656,691**	100	**8,547,240,016**	93.41
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	100	**9,977,000**	66.51
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	4	6	6	5,000,000	1 Dokumen	4,985,000	99.70
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2	2	4	4	10,000,000	3 Laporan	4,992,000	49.92
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan**	**100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7,663,285,891**	100	**7,050,268,480**	92.00
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	39	39	39	39	6,669,585,891	40 Orang	6,147,474,424	92.17

							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Dokumen	1	1	1	1	735,700,000	1 Dokumen	672,981,000	91.47
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen	33	33	33	33	208,000,000	33 Dokumn	179,869,500	86.48
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	2	2	2	50,000,000	2 Laporan	49,943,556	99.89
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**35,000,000**	100	**22,820,000**	65.20
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2	4	7	10	35,000,000	1 Laporan	22,820,000	65.20
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**35,000,000**	100	**34,663,778**	99.04
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1	1	1	1	35,000,000	5 Orang	34,663,778	99.04
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**638,770,800**	100	**696,475,105**	109.03
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2	4	6	8	15,000,000	3 Paket	14,973,000	99.82
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	2	3	4	50,000,000	1 Paket	49,755,000	99.51
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8	8	8	8	160,000,000	8 Paket	158,419,560	99.01
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2	2	4	4	40,000,000	4 Paket	39,914,000	99.79
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	1	1	1	20,000,000	1 Laporan	19,149,000	95.75
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	-	-	2	353,770,800	1 Laporan	414,264,545	117.10
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**395,000,000**	100	**369,149,614**	93.46
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	1	275,000,000	1 Laporan	235,094,614	85.49

								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	1	30,000,000	1 Laporan	29,645,000	98.82
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan					90,000,000	1 Laporan	104,410,000	116.01
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**368,600,000**	100	**363,886,039**	98.72
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	-	4	6	7	275,000,000	17 unit	270,654,560	98.42
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Peralatan	1	2	3	5	20,000,000	5 Peralatan	19,895,000	99.48
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Gedung	1	1	1	1	73,600,000	0	73,336,479	99.64

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan,

FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Nip. 196903282089082002
Pembina Utama Muda /IV.C

REALISASI ANGGARAN DPPPA TAHUN 2024

No		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasasi		
				Keuangan		Fisik
				Realisasi (Rp)	Persen (%)	Persen (%)
1		2	3	6		
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**8,979,903,000**	**8,547,240,016**	**95.18**	**100**
	i	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**10,000,000**	**9,977,000**	**99.77**	**100**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	4,985,000	99.70	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,992,000	99.84	100
	ii	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7,421,302,200**	**7,050,268,480**	**95.00**	**100**
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,512,082,200	6,147,474,424	94.40	100
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675,700,000	672,981,000	99.60	100
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183,520,000	179,869,500	98.01	100
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,943,556	99.89	100
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35,000,000**	**22,820,000**	**65.20**	**100**
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000	22,820,000	65.20	100
	iv	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**35,000,000**	**34,663,778**	**99.04**	**100**
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000	34,663,778	99.04	100
	v	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**700,000,800**	**696,475,105**	**99.50**	**100**
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,973,000	99.82	100
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,755,000	99.51	100
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000	158,419,560	99.01	100
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	39,914,000	99.79	100
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	19,149,000	95.75	100
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,000,800	414,264,545	99.82	100
	vi	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**410,000,000**	**369,149,614**	**90.04**	**100**
	15	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275,000,000	235,094,614	85.49	100
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,645,000	98.82	100
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,000,000	104,410,000	99.44	100
	vii	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**368,600,000**	**363,886,039**	**98.72**	**100**
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	275,000,000	270,654,560	98.42	100
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	19,895,000	99.48	100
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,600,000	73,336,479	99.64	100
II		**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**999,250,000**	**962,087,751**	**96.28**	**100**
	viii	**PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI**	**200,000,000**	**185,914,090**	**92.96**	**100**
	21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200,000,000	185,914,090	92.96	100
	ix	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI**	**80,000,000**	**78,129,340**	**97.66**	**100**
	22	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	80,000,000	78,129,340	97.66	100
	x	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI**	**719,250,000**	**698,044,321**	**97.05**	**100**
	23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630,000,000	611,642,986	97.09	100
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70,000,000	67,211,022	96.02	100
	25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	19,250,000	19,190,313	99.69	100
III		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**315,000,000**	**284,671,350**	**90.37**	**100**
	xi	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120,000,000**	**93,281,102**	**77.73**	**100**
	26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40,000,000	35,149,192	87.87	100
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80,000,000	58,131,910	72.66	100
	xii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI**	**195,000,000**	**191,390,248**	**98.15**	**100**
	28	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135,000,000	133,062,248	98.56	100
	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	60,000,000	58,328,000	97.21	100
IV		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**182,423,000**	**180,040,447**	**98.69**	**100**
	xiii	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**150,000,000**	**148,533,522**	**99.02**	**100**
	30	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000	148,533,522	99.02	100

	xiv	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32,423,000**	**31,506,925**	**97.17**	**100**
	31	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,423,000	31,506,925	97.17	100
V	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**140,000,000**	**130,404,460**	**93.15**	**100**
	xv	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.**	**140,000,000**	**130,404,460**	**93.15**	**100**
	32	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110,000,000	104,224,460	94.75	100
	33	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30,000,000	26,180,000	87.27	100
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**		**303,000,000**	**298,785,626**	**98.61**	**100**
	xvi	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI**	**135,000,000**	**133,694,164**	**99.03**	**100**
	34	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50,000,000	49,806,005	99.61	100
	35	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	85,000,000	83,888,159	98.69	100
	xvii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**168,000,000**	**165,091,462**	**98.27**	**100**
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168,000,000	165,091,462	98.27	100
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**650,000,000**	**635,478,664**	**97.77**	**100**
	xviii	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota**	**90,000,000**	**87,649,848**	**97.39**	**100**
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50,000,000	49,997,078	99.99	100
	38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	40,000,000	37,652,770	94.13	100
	xix	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI**	**30,000,000**	**29,460,020**	**98.20**	**100**
	39	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30,000,000	29,460,020	98.20	100
	xx	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**530,000,000**	**518,368,796**	**97.81**	**100**
	40	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30,000,000	26,173,350	87.24	100
	41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500,000,000	492,195,446	98.44	100
		Jumlah : 52 Sub Kegiatan	**11,569,576,000**	**11,038,708,314**	**95.41**	**100**